



PEMERINTAH PROVINSI
J A W A T I M U R

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
RENJA

2023

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA



[dinas_perumahan_rakyat_jatim](#)



[dprkpciptakarya](#)



www.pucktr.jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 tahun 2019, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019. Renja disusun berdasarkan rencana strategis yang telah di tuangkan di dalam RENSTRA Dinas tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2023.

Surabaya, JULI 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**



IR. BASU TRIHAKSORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.....	50
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	54
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	63
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	81
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN	113
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	113
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	114
3.3 Program dan Kegiatan.....	117
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	146
4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2023	146
4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	149
BAB 5 PENUTUP	156
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	156
5.2 Rencana tindak lanjut	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021	13
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	51
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur	63
Tabel 4. Data Kekeringan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	83
Tabel 5. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang di Akomodir	85
Tabel 6. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang tidak di Akomodir	104
Tabel 7. Dukungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam pokok-pokok pikiran Dewan	107
Tabel 8. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan	114
Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	116
Tabel 10. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	118
Tabel 11. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	127
Tabel 12. Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2023	147
Tabel 13. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	149

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum /lintas bidang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada

akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender.
22. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perda RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V. PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja tahun 2021 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel terlampir.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

dengan anggaran (DPA) Rp. 116,876,273,060,- realisasi sebesar Rp. 111,986,286,767,- atau 95.82%. Dengan target indikator kinerja **Persentase cakupan pelayanan akses Air Minum sebesar 96.83% dan telah terealisasi sebesar 95.02%**. Target dan capaian untuk indikator ini menggunakan perhitungan baru mengikuti perhitungan RPJMN 2019-2024. Realisasi cakupan pelayanan Air Minum belum mencapai target yang direncanakan karena perhitungan realisasi indikator yang dihitung oleh BPS menggunakan data jumlah penduduk yang terbaru sesuai hasil sensus penduduk 2020, sedangkan target indikator ini dihitung berdasarkan proyeksi dari jumlah penduduk menurut sensus penduduk Tahun 2010. Selain karena jumlah penduduk yang meningkat, realisasi kinerja SPAM Regional secara persentase juga mengalami penurunan, walaupun secara kuantitas jumlah KK yang dilayani terjadi peningkatan, cakupan pelayanan SPAM

Regional Umbulan dan Mojolagres pada Tahun 2020 dapat merealisasikan kapasitas air curah sebesar 1.147 lt/det atau setara dengan 458.800 jiwa, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 1.431.99 lt/det atau setara dengan 572.796 jiwa. Penurunan persentase capaian SPAM Regional tersebut karena peningkatan target kapasitas pelayanan SPAM Regional sebesar 65 lt/det.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, dengan anggaran (DPA) Rp. 116,876,273,060,- realisasi sebesar Rp. 111,986,286,767,- atau 95.82%, dengan target kinerja :
 - a. Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun sebanyak 89 dokumen, dan terealisasi 89 dokumen
 - b. Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun sebanyak 80 unit dan terealisasi 76 unit
 - c. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum sebanyak 50 orang dan tidak dapat direalisasikan
 - d. Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun, sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
 - e. Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum, sebanyak 3 kegiatan, dan tidak dapat direalisasikan

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

- a. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, dengan target kinerja Jumlah dokumen supervise sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen
- b. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, dengan target kinerja Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun sebanyak 80 unit, dan terealisasi 76 unit
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan terget kinerja Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan sebanyak 2 unit, dan terealisasi 2 dokumen
- d. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi, dengan target kinerja Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM sebanyak 50 orang dan tidak dapat terealisasi.

2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

dengan anggaran (DPA) Rp. 1,783,931,922,- realisasi sebesar Rp. 999,063,025,- atau 56.00%. Dengan target indikator kinerja :

Presentase cakupan pelayanan akses sanitasi 81.50 % dan telah terealisasi sebesar 80.97%. Realisasi cakupan pelayanan akses sanitasi pada Tahun 2021 tidak dapat memenuhi target yang direncanakan dikarenakan belum tersedianya perencanaan sanitasi yang memadai seperti masterplan sanitasi skala regional, sehingga pembangunan infrastruktur IPAL belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2021.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan indikator :

- a. Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun sebanyak 3 dokumen, dan terealisasi 3 dokumen
- b. Jumlah infrastruktur persampahan yang tersusun sebanyak 0 unit dan teralisasi 0 unit
- c. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan sebanyak 200 orang dan terealisasi 200 orang
- d. Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun sebanyak 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen
- e. Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 0 kegiatan.

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, mempunyai 3 sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen persampahan sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen
- Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi Kerjasama sebanyak 11 kabupaten/kota, dan terealisasi 11 kabupaten/kota
- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan, dengan indikator Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan sebanyak 200 orang dan terealisasi 200 orang

3. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**, dengan anggaran (DPA) Rp. 10,780,175,234,- realisasi sebesar Rp 9,267,302,555,- atau 85.97%. Dengan target indikator kinerja **Presentase cakupan pelayanan akses sanitasi 81.50 % dan telah terealisasi sebesar 80.97%**. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah mempunyai 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun sebanyak 27 dokumen dan terealisasi sebanyak 27 dokumen.
- b. Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun sebanyak 89 unit dan terealisasi sebanyak 88 unit. Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, dikarenakan tidak adanya potensi air tanah pada Desa Caluk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
- c. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 240 orang. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan melebihi target yang direncanakan karena anggaran yang seharusnya

digunakan untuk fullboard dialihkan menjadi halfday karena masa pandemic COVID-19, sehingga jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dapat lebih banyak.

- d. Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen.
- e. Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan.

Kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, mempunyai 3 sub kegiatan, yaitu :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan terealisasi sebanyak 3 dokumen
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, dengan indikator Jumlah infrastruktur air limbah sebanyak 7 unit dan terealisasi 6 unit
- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan indikator Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestic sebanyak 150 orang dan tidak terealisasi.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran (DPA) Rp. 27,182,179,784,- realisasi sebesar Rp. 26,515,947,630,- atau 97.55 %. Dengan target indikator kinerja **Presentase cakupan pelayanan akses sanitasi 81.50 % dan telah terealisasi sebesar 80.97%.** **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** mempunyai 1 kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, dengan indikator :

- a. Jumlah dokumen perencanaan drainase yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen
- b. Jumlah infrastruktur drainase yang terbangun sebanyak 2 unit, dan terealisasi 2 unit
- c. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang drainase sebanyak 120 orang dan terealisasi 120 orang
- d. Jumlah dokumen monitoring evaluasi drainase yang tersusun sebanyak 0 dokumen
- e. Jumlah pendampingan teknis perencanaan drainase sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi mempunyai 2 sub kegiatan, yaitu :

- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan, dengan indikator Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase sebanyak 120 orang dan terealisasi 120 orang
- Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya, dengan indikator Jumlah infrastruktur drainase sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit.

5. Program Pengembangan Permukiman dengan anggaran (DPA) Rp. 6,382,960,600,- realisasi sebesar Rp. 5,476,849,015,- atau 85.80%. Dengan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman 82.00 dan telah terealisasi sebesar 84.50. Program Pengembangan Permukiman mempunyai satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola sebanyak 973 unit dan terealisasi 973 unit. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi mempunyai satu sub kegiatan yaitu :

- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dipelihara sebanyak 4 rusunawa dan terealisasi 4 rusunawa

6. Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran (DPA) Rp. 252,283,523,050,- realisasi sebesar Rp. 211,138,775,338,- atau 83.69 %. Dengan target indikator kinerja Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan sebesar 100% dan terealisasi 93.88%. Program Penataan Bangunan Gedung mempunyai 1 kegiatan yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator kegiatan:

- a. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan Gedung sebanyak 220 orang dan terealisasi sebanyak 220 org
- b. Jumlah gedung yang terbangun sebanyak 30 gedung dan terealisasi 27 gedung
- c. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi sebanyak 1,200 orang dan terealisasi 1,200 orang

Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi mempunyai 4 sub kegiatan yaitu :

- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator jumlah Gedung sebanyak 11 gedung dan terealisasi 8 gedung
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah gedung yang direnovasi sebanyak 19 gedung dan terealisasi sebanyak 19 gedung
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi, dengan indikator :

- Jumlah laporan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur sebanyak 150 laporan dan terealisasi 150 laporan
- Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan Gedung sebanyak 220 orang dan terealisasi 220 orang
- Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara, dengan indikator Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara sebanyak 100 dokumen dan terealisasi 100 dokumen

7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan anggaran (DPA) Rp 1,323,208,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,054,652,500,- atau sebesar 79.70 % Dengan target indikator kinerja Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan sebesar 100% dan realisasi sebesar 93.88%. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya mempunyai 1 kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan anggaran (DPA) Rp. 1.457.176.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 892.894.355,- atau sebesar 61,28%. Dengan target kinerja. Jumlah orang yang terlayani akses informasi sebanyak 11.000 orang, realisasi sebesar 18.808 orang. Capaian melebihi target yang direncanakan karena traffic pengunjung yang mengunjungi web informasi bidang perumahan dan permukiman melebihi target yang direncanakan.
- b. Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman dengan anggaran (DPA) Rp. 792.344.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 628.669.946,- atau sebesar 79,34% Dengan target kinerja Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani sebanyak 100 pengujian dan terealisasi 274 pengujian. Jumlah pengujian yang dilayani melebihi target yang direncanakan karena banyaknya uji lab yang diajukan dan dilayani.
- c. Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun dengan anggaran (DPA) Rp. 5.985.295.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.716.831.510,- atau sebesar 95,51% Dengan target kinerja Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola sebanyak 973 unit dan terealisasi 973 unit.

8. Program Pelayanan Kesekretariatan dengan anggaran (DPA) Rp 8.833.932.764,- terealisasi sebesar Rp. 8.217.432.958,- atau sebesar 93,02%. Dengan target indikator kinerja :

- Indeks profesionalitas ASN sebesar 89.86 dan tercapai 46.57. Indeks profesionalitas ASN tidak dapat mencapai target yang direncanakan dikarenakan semenjak Tahun 2020 perhitungan indeks ASN menggunakan aplikasi e-master, dengan salah satu variable penilaiannya adalah jumlah diklat yang diikuti oleh ASN selama 2 tahun terakhir, sehingga diklat yang

diakui adalah kegiatan diklat antara 2018 dan 2019 saja, dengan demikian menjadikan target indeks ASN Tahun 2020 tidak dapat tercapai.

- Persentase realisasi anggaran sebesar 90% dan tercapai 77,97%. Realisasi anggaran Dinas tidak dapat memenuhi target karena adanya pandemi COVID-19 membuat tingkat penyerapan khususnya perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena banyak kegiatan rapat luring dialihkan menjadi rapat daring.
- Persentase indikator program yang tercapai sebesar 60% dan tercapai 75%. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan 12 indikator program yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, terdapat 3 indikator program yang targetnya tidak tercapai, yaitu persentase cakupan sanitasi, jumlah backlog kepemilikan rumah, dan persentase realisasi anggaran.

Program Pelayanan Kesekretariatan mempunyai 3 kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah dengan anggaran (DPA) Rp. 637.000.000,- realisasi sebesar Rp. 605.838.904,- atau sebesar 95,11% Dengan target kinerja Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah sebanyak 9 dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen.
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan anggaran (DPA) Rp. 1.304.195.000,- realisasi sebesar Rp. 1.156.686.510,- atau sebesar 88,69%. Dengan target kinerja Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan sebanyak 5 laporan dan terealisasi 5 laporan.
- c. Ketatausahaan dan Kepegawaian dengan anggaran (DPA) Rp. 6.892.737.764,- realisasi sebesar Rp. 6.454.907.544 atau sebesar 93,65%. Dengan target kinerja Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian sebanyak 3 dokumen dan tercapai 3 dokumen

Urusan Perumahan

1. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan anggaran (DPA) Rp. 17.260.972.000,- realisasi sebesar Rp. 15.959.735.191,- atau 92,46%. Dengan target indikator kinerja :
 - Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 81,64% dan terealisasi sebesar 95,79%, capaian melebihi target yang direncanakan karena adanya dukungan pelaksanaan program Kotaku dan peran serta kabupaten/kota.
 - Jumlah backlog kepemilikan rumah sebesar 1.353.300 dan terealisasi 1.348.390 unit.

Program pengembangan perumahan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dengan anggaran (DPA) Rp. 7.295.182.000,- realisasi sebesar Rp. 6.673.326.150,- atau 91,48%. Dengan target kinerja Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani seluas 5,50 dan terealisasi 10,94 Ha. Capaian kegiatan melebihi target karena kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada aspek-aspek yang menyebabkan kekumuhan, sehingga menurunkan scoring tingkat kekumuhan
- b. Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya dengan anggaran (DPA) Rp. 6.253.290.000,- realisasi sebesar Rp. 6.018.888.950,- atau 96,25%. Dengan target kinerja :
 - Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 20 dokumen.
 - Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun sebanyak 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen.
 - Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun sebanyak 5.850 meter dan terealisasi 6.906 meter.
- c. Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial dengan anggaran (DPA) Rp 3.712.500.000,- realisasi sebesar Rp. 3.267.520.091,- atau 88,01%. Dengan target kinerja :
 - Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun sebanyak 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen.
 - Jumlah jenis unit PSU rusun yang terbangun sebanyak 0 unit dan terealisasi 0 unit.
 - Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen.

Urusan Pertanahan

1. Program Pertanahan dengan anggaran (DPA) Rp. 471.252.667,- realisasi sebesar Rp. 421.119.990,- atau 89,36%. Dengan target indikator Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun sebesar 20% dan telah terealisasi sebesar 20%. Program pertanahan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Inventarisasi Data Pertanahan dengan anggaran (DPA) Rp. 471.252.667,- realisasi sebesar Rp. 421.119.990,- atau 89,36%. Dengan target kinerja Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun sebesar 1 dokumen dan terealisasi 2 dokumen. Realisasi melebihi target karena pada TW 4 (PAK) sesuai dengan Permengadri 70 Tahun 2019 bahwa inventarisasi data pertanahan salah satunya adalah tanah timbul yang terdapat di pesisir Kab-Kota Probolinggo, dan adanya isu isu startegis berupa erupsi Gunung Bromo pada Tahun 2011 yang menyebabkan endapan lahar pembentuk daratan di tepian pantai Kota Probolinggo

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan program / kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan :

- a. Terdapat desa/lokasi kegiatan fisik pembangunan SPAM yang tidak terdapat potensi sumber air baku, minim sumber air baku bahkan apabila dilakukan pengeboran tanah tidak ada potensi dan tidak bisa dijadikan alternatif
- b. Terdapat penolakan dari pemerintah kabupaten, sehingga ada pembangunan infrastruktur air limbah yang tidak dapat dilaksanakan
- c. Terdapat 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung yang belum selesai dilaksanakan di tahun 2021 sehingga memengaruhi penyerapan anggaran dan pencapaian target rencana output
- d. Pemantauan Ijin Pemanfaatan Ruang dipengaruhi oleh masuknya jumlah investasi masuk yang memerlukan IPR, sehingga tidak dapat diprediksi naik atau turunnya jumlah IPR yang masuk.
- e. Terdapat perubahan kebijakan pedoman Penyusunan Basis Data Rencana tata Ruang (Permen ATR Nomor 14 Tahun 2021) sehingga perlu dilakukan penyesuaian muatan berdasarkan pedoman basis data. Selain itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, sehingga proses RTRWP menunggu penyesuaian dokumen Perda Prov Jatim Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Tahun 2018-2028.
- f. Pelaksanaan PPKM mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan secara tatap muka, sehingga ada kegiatan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan.
- g. Pasca terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sudah tidak diperlukan Rekomendasi Gubernur dalam proses Penetapan RRTR
- h. Indikator professional ASN tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan kurangnya diklat bimbingan teknis yang dipersyaratkan (2 tahun terakhir dan jumlah jam tertentu) yang diikuti oleh ASN di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Upaya Pemecahan Permasalahan :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan PU SDA terkait ketersediaan air baku.
- b. Melaksanakan kolaborasi pendanaan dengan pemerintah pusat, CSR, dan swadaya masyarakat.

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur, sehingga konstruksi pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan di daerah.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi konstruksi fisik pembangunan gedung, sehingga diharapkan konstruksi fisik pembangunan Gedung dapat selesai di waktu yang telah direncanakan. Apabila tidak selesai sampai dengan akhir tahun, maka dapat diberikan kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan persyaratan menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan, sehingga sisa fisik yang belum dibayarkan akan dicairkan pembayarannya di PAPBD (PAK) Tahun 2022.
- e. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi (zoom meeting) untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
- f. Meningkatkan keikutsertaan ASN dalam diklat bimbingan teknis yang dipersyaratkan.

Urusan Perumahan

Permasalahan :

1. Perhitungan jumlah backlog kepemilikan rumah dan persentase penanganan kawasan permukiman kumuh masih dalam proses, sehingga realisasi kinerja pada Tahun 2021 untuk indikator kinerja tersebut masih belum final.
2. Jumlah luas Kawasan kumuh permukiman kumuh pada Tahun 2021 hanya terealisasi 12 Ha dari target yang 14 Ha, dikarenakan penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi masih dalam proses penanganan penurunan skoring sesuai dengan Permen PU 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, sehingga belum dapat menangani permukiman kumuh secara menyeluruh, karena penanganan Kawasan kumuh memerlukan biaya yang besar dan sinergitas dari berbagai pihak di tingkat pusat hingga daerah.

Upaya Pemecahan Permasalahan :

1. Menetapkan baseline Kawasan kumuh kewenangan provinsi, sehingga perhitungan penanganan kumuh dapat segera dilakukan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh.

Secara garis besar, target-target pada Tahun 2021 dapat dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target dikarenakan karena :

1. Adanya PPKM, sebagai dampak pandemic COVID-19 , sehingga beberapa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, seperti sosialisasi tidak dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan pembangunan fisik (penanganan desa rawan air) yang tidak memenuhi target perencanaan dikarenakan karena pada tahap perencanaan fisik baru diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik tidak dimungkinkan karena tidak ditemukannya potensi air baku.
3. Kegiatan pembangunan fisik (infrastruktur air limbah) tidak dapat dilaksanakan karena adanya surat penolakan dari Kabupaten Blitar

4. Kegiatan pembangunan fisik bangunan Gedung (3 unit) masih belum selesai pekerjaannya hingga akhir Tahun 2021, sehingga diberikan kesempatan 50 hari melampaui tahun anggaran

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021

FORM 2019

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11
		Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	80,83					80,83	103,44%
		Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	73,07	48,1					48,1	65,83%
		Persentase KK yang memiliki rumah	78,57	87,58					87,58	111,47%
		Persentase Rumah Layak Huni	81,17	95,31					95,31	117,42%
		Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	22,15	18,67					18,67	84,29%
1.03.0300.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100					100	100,00%
1.03.0300.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	100					100	100,00%
1.03.0300.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100					100	100,00%
1.03.0300.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	20	20					20	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1.03.0300.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	20	20				20	100,00%	
1.03.0300.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%				100%	100,00%	
1.03.0300.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	36	36				36	100,00%	
1.03.0300.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	30	30				30	100,00%	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	70	70				70	100,00%	
1.03.0300.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100				100	100,00%	
1.03.0300.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	27	27				27	100,00%	
1.03.0300.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	3	3				3	100,00%	
1.03.0300.31	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)	7,82	20,07				20,07	256,65%	
		Angka luasan kawasan permukiman kumuh (penurunan)	884,91	75,5				75,5	8,53%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1.03.0300.31.001	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	Jumlah dokumen /laporan pengawasan renovasi RTLH	25	25				25	100,00%	
1.03.0300.31.002	Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman	Panjang jalan lingkungan dan atau drainase terbangun	5000	9.377,32				9.377,32	187,55%	
1.03.0300.31.003	Penyelenggaraan Rumah Susun	Jumlah jenis unit PSU rusun yang terbangun	2	2				2	100,00%	
1.03.0300.32	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perbatasan	Persentase perencanaan permukiman yang ditindaklanjuti	50	53,33				53,33	106,66%	
1.03.0300.32.001	Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	6	6				6	100,00%	
1.03.0300.32.002	Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah Strategis dan cepat tumbuh	7	7				7	100,00%	
1.03.0300.32.003	Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah dokumen Pendataan kawasan kumuh perkotaan	2	2				2	100,00%	
1.03.0300.33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan layanan Sanitasi yang aman	90,07	69,02				69,02	76,63%	
		Persentase Rumah Tangga yang dapat Pelayanan Air Bersih yang layak	85,75	77,67				77,67	90,58%	
1.03.0300.33.001	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	1	1				1	100,00%	
		Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi Terbangun;	1	1				1	100,00%	
		Jumlah Dokumen Pengawasan	1	1				1	100,00%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1.03.0300.33.002	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih	9	9				9	100,00%	
		Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Terbangun	45	40				40	88,89%	
		Jumlah dokumen pengawasan pengembangan sarana prasarana air bersih	9	9				9	100,00%	
1.03.0300.33.003	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional Terbangun	1	1				1	100,00%	
		Jumlah Dokumen Pengawasan	1	1				1	100,00%	
1.03.0300.33.004	Pembinaan Teknis dan Manajemen Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Sanitasi	60	83				83	138,33%	
		Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Air Bersih	60	100				100	166,67%	
1.03.0300.34	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	6,58	45,79				45,79	695,90%	
1.03.0300.34.001	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	67	67				67	100,00%	
		Jumlah Gedung Terbangun	49	49				49	100,00%	
		Jumlah Dokumen Pengawasan	49	49				49	100,00%	
1.03.0300.34.002	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	2				2	100,00%	
1.03.0300.34.003	Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	200	203				203	101,50%	
1.03.0300.35	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan Pengujian	80	81,5	81,5	101,88%				
1.03.0300.35.001	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Orang yang terlayani akses Informasi	11.150	121.392	121.392	1088,72%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1.03.0300.35.002	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan	100	100				100	100,00%	
1.03.0300.35.003	Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Pengujian yang Terlayani	100	133				133	133,00%	
1.03.0300.35.004	Penataan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah KK yang Terlayani	752	860				860	114,36%	
		Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang) yang telah di keluarkan	90	100				100	111,11%	
1.03.0300.54	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	80	99,98				99,98	124,98%	
		Jumlah dokumen evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR Kab/Kota)	12	25				25	208,33%	
		Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota yang sudah mendapat izin lokasi	40	0				0	0,00%	
1.03.0300.54.011	Penyusunan RTR Kawasan strategis	Jumlah RTR Kawasan Strategis yang tersusun	1	1				1	100,00%	
1.03.0300.54.012	Penyusunan Peta Dasar Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Peta Dasar RDTR Kab/Kota	4	4				4	100,00%	
1.03.0300.54.013	Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis	12	28				28	233,33%	
1.03.0300.54.014	Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Ruang	jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun	1	1				1	100,00%	
1.03.0300.54.15	Monitoring Evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	Jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	7	44				44	628,57%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1.03.0300.54.016	Penatan Pertanahan Lintas Kab/Kota	Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas Kab/Kota	10	8.750,97					8.750,97	87509,70%

FORM 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks profesionalitas ASN	90,62	46,57					46,57	51%
		Persentase realisasi anggaran	90	77,97					77,97	87%
		Persentase indikator program yang tercapai	80	75					75	94%
1.03.01.003	Ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang tersusun	18	3					3	17%
1.03.01.002	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	30	5					5	17%
1.03.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran PD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun	54	9					9	17%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.34	Program Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80	60					60	75%
		Persentase Kesesuaian Implementasi Sektor Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang	90	100					100	111%
		Persentase Pemberian Rekomendasi Gubernur terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	95	77					77	81%
1.03.34.001	Pelayanan Informasi Penataan Ruang	jumlah informasi tata ruang yang sudah dipublikasikan	50	1					1	2%
1.03.34.002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun	5	1					1	20%
1.03.34.003	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program pembangunan terhadap rencana tata ruang	5	1					1	20%
1.03.34.004	Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur	32	6					6	19%
		Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur	65	10					10	15%
1.03.34.005	Pemanfaatan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	25	23					23	92%
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	125	20					20	16%
1.10.21	Program Pertanahan	Presentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah disusun	100	20					20	20%
1.10.21.001	Inventarisasi Data Pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	5	2	2	40%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.19	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	90,68	95,79					95,79	106%
		Jumlah backlog kepemilikan rumah	6690000	1348390					1348390	20%
1.04.19.001	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	72	10,94					10,94	15%
1.04.19.002	Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	100	20					20	20%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	5	0					0	0%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	50000	6906					6906	14%
1.04.19.003	Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun	25	0					0	0%
		Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun	10	0					0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun	25	3					3	12%
1.03.35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	85	70,31					70,31	83%
		Persentase cakupan pelayanan akses air minum	88	80,43					80,43	91%
1.03.35.001	Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air limbah dan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	75	4	4	5%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	75	0					0	0%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	1800	0					0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	50	2					2	4%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	15	1					1	7%
1.03.35.002	Penyelenggaraan Sistem Persampahan	Jumlah dokumen perencanaan Persampahan yang tersusun	5	2					2	40%
		Jumlah infrastruktur Persampahan yang terbangun	2	0					0	0%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang Persampahan	1800	50					50	3%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun	50	1					1	2%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan Persampahan	15	3					3	20%
1.03.35.003	Penyelenggaraan Sistem penyediaan air minum	Jumlah dokumen perencanaan Air minum yang tersusun	376	27					27	7%
		Jumlah infrastruktur Air minum yang terbangun	376	88					88	23%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang Air minum	1800	2400	2400	133%				
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi Air minum yang tersusun	50	2	2	4%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan Air minum	15	3					3	20%
1.03.33	Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	100	100					100	100%
1.03.33.001	Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	2500	280					280	11%
1.03.33.002	Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah gedung yang terbangun	22	19					19	86%
1.03.33.003	Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	1500	541					541	36%
1.03.36	Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	81	82,56					82,56	102%
1.03.36.001	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah orang yang terlayani akses informasi	67100	18808					18808	28%
1.03.36.002	Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani	660	274					274	42%
1.03.36.003	Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola	5514	973					973	18%

FORM 2021-2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase cakupan pelayanan akses air minum		100%		81,60%	95,02%	116,45%			
		Minum yang layak									
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	100%					97,89%	97,89%	100,00%
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun		89		89	89	100,00%			
		Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun		80		80	76	95,00%			
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum		50		50	0	0,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun		2		2	1	50,00%			
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum		3		3	0	0,00%			
			Jumlah RT yang terlayani akses air minum		10.521.516						10.516.716
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi		18		2	2	100,00%	10	10	100,00%
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun		250		80	76	95,00%	71	71	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan		11		2	2	100,00%	3	3	100,00%
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM		450		50	0	0,00%	700	700	100,00%
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi		95%		76,92%	80,97%	105,27%			
			Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	21,50%					12,19	12,19	100,00%
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun.		3		3	3	100,00%			
		Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun.		0		0	0	0,00%			
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan.		200		200	200	100,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun		0		0	0	0,00%			
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan.		4		3	0	0,00%			
			Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4		4				4	4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan		16		3	3	100,00%	3	3	100,00%
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun		2		0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama		11		11	11	100,00%	11	11	100,00%
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan		650		200	200	100,00%	200	200	100,00%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi		80,97%		76,92%	80,97%	105,27%			
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	95%					83	83	100,00%
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun		6		6	5	83,33%			
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun		5		5	6	120,00%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase		240		240	0	0,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun		0		0	0	0,00%			
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase		3		3	3	100,00%			
			Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	35.641.908					35.640.908,00	35.640.908,00	100,00%
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		12		3	3	100,00%	3	3	100,00%
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah		9		7	6	85,71%	4	4	100,00%
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik		640		150	0	0,00%	300	300	100,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi		1		76,92%	80,97%	105,27%			
			Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8,33%					4,17	4,17	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan drainase yang tersusun		2		2	2	100,00%			
		Jumlah infrastruktur drainase yang terbangun		2		2	2	100,00%			
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang drainase		120		120	120	100,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi drainase yang tersusun		0		0	0	0,00%			
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan drainase		3		3	3	100,00%			
			Jumlah akses drainase terbangun		3000 M					1000	1000
1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase		520		120	120	100,00%	300	300	100,00%
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase		13		2	2	100,00%	3	3	100,00%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman		82		82	84,5	103,05%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973					973	973	100,00%
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola		973		973	973	100,00%			
			Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	100%					100%	100%	100,00%
1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dipelihara		4		4	4	100,00%			
			Jumlah rusunawa yang dikelola	4					4	4	100,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		0%		100	93,88	93,88%			
			Presentase Penataan Bangunan Gedung	100%					100%	100%	100,00%
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung		220		220	220	100,00%			
			Jumlah gedung yang terbangun	30		30	27	90,00%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi		1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00%			
			jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	56					16	16	100,00%
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung		11		11	8	72,73%			
			Jumlah gedung yang dibangun	28					18	18	100,00%
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direnovasi		19		19	19	100,00%			
			Jumlah gedung yang direhabilitasi	28					12	12	100,00%
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	450		150	150	100,00%	150	150	100,00%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	1.210		220	220	100,00%	220	220	100,00%
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi		Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	5					5	5	100,00%
			Jumlah gedung cagar budaya yang ditetapkan dan direhabilitasi	6					0	0	0,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara		280		100	100	100,00%	100	100	100,00%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		100%		100	93,88	93,88%			
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	33,33%					20,00%	20,00%	100,00%
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung		220		220	220	100,00%			
			Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	6					2	2	100,00%
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/ kota		8		2	2	100,00%	2	2	100,00%
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	6					2	2	100,00%
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6					2	2	100,00%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		100%		100	93,88	93,88%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman		82		82	84,5	103,05%			
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi (TABA)	100%					100	100	100,00%
			Indeks Kepuasan pengguna jasa pengujian konstruksi dan bahan bangunan	83					82,5	82,5	100,00%
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi		1200		1.200,00	1.200,00	100,00%			
			Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	4560					1520	1520	100,00%
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		4260		900	900	100,00%	700	700	100,00%
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan		1500		300	300	100,00%	350	350	100,00%
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi		1200		1.200,00	1.200,00	100,00%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani		100		100	269	269,00%			
			Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80					80	80	100,00%
			Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	6255					2085	2085	100,00%
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi		8000		2.000,00	2.000,00	100,00%	2000	2000	100,00%
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan		340		85	85	100,00%	85	85	100,00%
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan		400		100	269	269,00%	100	100	100,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh		0		83,9	100	119,19%			
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah		1.345.500,00		1.345.500,00	1.115.609,00	82,91%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	6					3	3	100,00%
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun		12		12	12	100,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun		0		0	0	0,00%			
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun		5000		5.000,00	7.810,00	156,20%			
		Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		16					3	3	100,00%
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		9		4	4	100,00%	1	1	100,00%
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		6					1	1	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	5					1	1	100,00%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh		0		83,9	100	119,19%			
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah		1345500		1.345.500,00	1.115.609,00	82,91%			
			Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12,18					11	11	100,00%
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani		14		14	12,85	91,79%			
			Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36,57					7,46	7,46	100,00%
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		5		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani		41		14	12,85	91,79%	8	8	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		26		11	11	100,00%	5	5	100,00%
1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	48		12	12	100,00%	7	7	100,00%
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh		5795		2.000,00	7.810,11	390,51%	1.156,00	1.156,00	100,00%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh		100		83,9	100	119,19%			
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah		1.345.500		1.345.500,00	1.115.609,00	82,91%			
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		24%					21%	21%
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun		12		12	12	100,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun		0		0	0	#DIV/0!			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun		5000		5.000,00	11.969,49	239,39%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun		0		0	0	#DIV/0!			
		Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun		3		2	2	100,00%			
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun		0		0	0	#DIV/0!			
			Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	72					22	22	100,00%
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya		31		12	12	100,00%	7	7	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Umum dan Komersial		16		3	3	100,00%	4	4	100,00%
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun		10852		2.500,00	9.492,46	379,70%	2622	2622	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun		6686		2.500,00	2.477,13	99,09%	1249	1249	100,00%
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya		5		1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Umum dan Komersial		5		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang		80		56	61,75	110,27%	78	78	100,00%
		Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota		0		80	80	100,00%			
		Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi		0		90	100	111,11%			
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun		1		1	1	100,00%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	80					60	60	100,00%
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	100%		75	50	66,67%	85%	85%	100,00%
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota		80		80	75	93,75%			
		Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		580					100	100	100,00%
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1					1	1	100,00%
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)		5		5	20	400,00%			
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur		9		9	35	388,89%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	34					10	10	100,00%
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen RRTR Provinsi yang disusun		1		1	1	100,00%			
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota		5		5	20	400,00%			
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		9		9	35	388,89%			
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota		34					10	10	100,00%
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang		1		1	1	100,00%			
		Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan		10		10	10	100,00%			
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan		6					2	2	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan		40		10	11	110,00%	10	10	100,00%
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan		10		10	29	290,00%			
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi		25		25	25	100,00%			
		Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang		112					38	38	100,00%
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan		10		10	29	290,00%			
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi		25		25	25	100,00%			
		Jumlah pengawasan perizinan		105					30	30	100,00%
	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang		1					1	1	100,00%
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		3					1	1	100,00%
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)		3					1	1	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun		0%		40	40	100,00%			
			Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100%					100%	100%	100,00%
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun		4		1	2	200,00%			
			Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	60					20	20	100,00%
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Penetapan lokasi		20		20	20	100,00%			
			Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	60					20	20	100,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun		0,38		38	38	100,00%			
			Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	1					70%	70%	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun		2		1	2	200,00%			
			Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	8					2	2	100,00%
2.10.10.1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen pertanahan		2		2	2	100,00%			
			Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	8		86,84	84,37	97,16%	2	2	100,00%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persentase indikator program yang tercapai	0,9062		90,05	83,33	92,54%	90,24	90,24	100,00%
		Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi anggaran	0,9		90	92,9	103,22%	90	90	
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	85		77	65	84,42%	80	80	
		Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman		82		82	84,5	103,05%			
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah		23		14	14	100,00%	9	9	100,00%
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		36		11	11	100,00%	7	7	100,00%
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja		18		3	3	100,00%	5	5	100,00%
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja		16		4	4	100,00%	4	4	100,00%
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	36		5	5	100,00%	12	12	100,00%
		Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)			192.000,00	272.515,00	141,93%	12	12	100,00%
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan keuangan		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD		8		2	2	100,00%	2	2	100,00%
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3		3	3	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	36					12	12	100,00%
1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan	1		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Kegiatan dan Laporan	12		2	2	100,00%	4	4	100,00%
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan	2					2	2	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan		5		5	5	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		12		3	3	100,00%	3	3	100,00%
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai		12		12	12	100,00%			
			Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	36					12	12	100,00%
1.03.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		2		1	1	100,00%	0	0	#DIV/0!
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP		48		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3					1	1	100,00%
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		3		3	3	100,00%			
		Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi		192000		192.000	272.515,00	141,93%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa (TU)	77					11	11	100,00%
			Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa (UPT)						11	11	100,00%
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan (TU)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.06.02		Jumlah paket pengadaan (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan (TU)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.06.04		Jumlah paket pengadaan (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan (TU)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.06.05		Jumlah paket pengadaan (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan (TU)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.06.06		Jumlah paket pengadaan (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan		121		1	1	100,00%	40	40	100,00%
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket pengadaan (TU)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.06.09		Jumlah paket pengadaan (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital		2		2	2	100,00%			
			Jumlah Daftar Arsip Aktif	9					3	3	100,00%
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		3		3	3	100,00%			
		Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi		192000		192.000,00	272.515,00	141,93%			
1.04.01.1.07			Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	33					11	11	100,00%
			Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana						11	11	100,00%
1.03.01.1.09.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan		8		2	2	100,00%	2	2	100,00%
1.04.01.1.09.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan (UPT)		3		1	1	100,00%	2	2	100,00%
1.0.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (TU)		3		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.04.01.1.09.06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT)		3		2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		3		3	3	100,00%			
		Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi		192000		192.000,00	272.515,00	141,93%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (TU)	36					12	12	100,00%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)	36					12	12	100,00%
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen (TU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12		12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa (TU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pekayanan Umum Kantor yang disediakan	1		1	1	100,00%	8	8	100,00%
		Jumlah Jasa (UPT)		1		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		3		3	3	100,00%			
		Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi		192000		192.000,00	272.515,00	141,93%			
			Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	36					12	12	100,00%
			Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	36					12	12	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2022)	TARGET KINERJA CAPAIAN PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021			REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT REALISASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (TU)		35		11	11	100,00%	8	8	100,00%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (UPT)		6		3	3	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara (TU)		6		3	3	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Gedung yang dipelihara (UPT)		4		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara		3		0	0	0,00%	1	1	100,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam NSPK, SPM dan IKK sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan definisi operasional merupakan rerata presentase capaian pekayaan akses air minum, presentase cakupan pelayanan sanitasi layak dan presentase penurunan luas permukiman kumuh perkotaan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh kinerja program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jenis Indikator yang dikaji berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain terkait dengan persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, persentase cakupan pelayanan akses sanitasi aman dan air minum layak, presentase penanganan Kawasan permukiman kumuh, dan presentase penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	V				78.14%	78.44%	80.81%	83.56%	86.85%	90.15%	80.83%	82.18%	80.97%	83.56%	86.85%	90.15%	
2	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	V				-	-	-	50%	60%	80%	-	-	-	50%	60%	80%	Merupakan indikator tujuan baru (2022-2024)
3	Persentase KK yang memiliki rumah		V			78.57%						87.58%						
4	Persentase rumah layak huni		V			81.17%						98.68%						
5	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh		V			22.15%						18.67%						
6	Persentase kesesuaian rencana tata ruang		V				50%	60%	88%	89%	90%		55.97%	87.60%	88%	89%	90%	
7	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni		V				44.84%	68.57%	69.80%	72.62%	75.44%		68.08%	66.93%	69.80%	72.62%	75.44%	
8	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah		V				86.09%	86.84%	87.59%	88.34%	89.09%		84.35%	84.37%	87.59%	88.34%	89.09%	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota)			V		2.25%	26.28%	33.06%	95.23%	100%	100%	2.19%	23.32%	88.82% *)	95.23% *)	100% *)	100% *)	Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun
10	Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional			V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum memiliki SPAL Regional, tahun 2021 masih Menyusun dokumen RISPAL
11	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada bencana alam provinsi (2019-2021), status bencana provinsi berdasarkan SK Gubernur (2022-2024)
12	Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena			V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi dari tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan																	
13	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				V		26.28%	33.06%	95.23%	100%	100%		23.32%	88.82%*)	95.23%*)	100%*)	100%*)	Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun
14	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani				V		81.64%	100 %	11.00%	11.56%	12.18%		95.79%	100 %	11 %	11.56%	12.18%	Pada Tahun 2022, perhitungan penanganan kawasan kumuh didasarkan pada base line terbaru, karena pada Tahun 2021 penanganan kawasan kumuh sesuai dengan base line lama sudah tercapai 100%
15	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU				V		9%	13%	22%	24%	26%		8.19%	13%	22%	24%	26%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG's; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

a. Isu Strategis terkait yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

1. Belum optimalnya pemenuhan data pelayanan air minum, air limbah, dan drainase sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara maksimal.
2. Capaian pelayanan air minum Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021 mencapai 95,02% dan sanitasi 80,97%, sedangkan luas kawasan kumuh yang tertangani sampai tahun 2021 seluas 23,794 Ha dengan baseline baru dari 1.905,53 Ha yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Masih ada daerah rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan air bersih.
4. Belum optimalnya pemenuhan data terkait perumahan dan permukiman, sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara tepat.
5. Terbatasnya sumber daya untuk pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perencanaan tata ruang, baik dalam tahap perencanaan,

- pemanfaatan, dan pengendalian.
7. Belum optimalnya proses penetapan RUTR/RRTR (Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Rinci Tata Ruang) yang terkendala oleh substansi perpetaan yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.
 8. Pada penyusunan rencana rinci terdapat ketidaksesuaian muatan dengan kebijakan pada rencana umum.
 9. Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang.
 10. Reforma agrarian (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/ Kota belum tertangani dengan optimal
 11. Keterbatasan dokumen pertanahan dan penyelesaian (Mediasi) sengketa/ konflik/ perkara tanah garapan
 12. Adanya pandemic Covid-19 di seluruh negeri menyebabkan pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19 serta pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah.

b. Isu Percepatan Penerapan SPM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.
- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

c. Isu Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan

gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia dan kelompok-kelompok lainnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan responsive gender dalam pembangunan Jawa Timur diantaranya:

1. Perencanaan dalam bangunan Gedung terdapat ruang laktasi, pemisahan area utilitas (Kamar mandi/WC) antara laki-laki dan perempuan, KM/WC kaum difable yang didesain khusus, tempat parkir untuk perempuan dan difable yang lebih dekat dengan entrance, ramp dan railing, tempat bermain anak-anak, akan tetapi tidak semua Gedung menerapkan hal tersebut.
2. Partisipasi kaum perempuan baik dari segi penerima manfaat dan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti KOTAKU (penanganan Kawasan kumuh), Pamsimas dan Sanimas/ Sandes, TPS3R.
3. Pembangunan penyediaan sarpras air bersih seperti pipanisasi dari sumber air ke rumah penduduk untuk mempermudah jangkauan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sanitasi (drainase, persampahan, air limbah domestik, MCK) untuk kemudahan jangkauan akses utilitas dan jalan lingkungan yang mempermudah mobilisasi dalam melakukan kegiatan/ aktivitas.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) di tahun

2017 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender
3. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
4. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
6. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

d. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 tahun 2019

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk

pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum Keciptakarya-Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Pembangunan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

e. Isu Pemulihan Pandemi Covid – 19

Pada awal tahun 2020 terdapat penyebaran pandemi Coronavirus-2019 (covid-19) yang dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Dampak yang dialami cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. maka tema RKP 2021, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Rencana. Provinsi Jawa Timur termasuk dikategorikan pandemic dengan prosentase tinggi. Pada Tahun 2020 terdapat kegiatan penyusunan DED Pengembangan BTS mengingat bahwa kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru) pada Tahun 2021 ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) Kawasan Super Prioritas Pengembangan Pariwisata Nasional Provinsi Jawa Timur perlu memberikan dukungan pengembangan permukiman salah satunya melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum yang bersinergi dengan pengembangan Kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya pemulihan

ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 melalui pengembangan sector pariwisata.

f. Isu Strategis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja)

Pada Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan UU No 11 Tahun 2020, atau yang lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja, yang dibentuk dengan tujuan untuk :

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
 - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
 - b. Ketenaga kerjaan
 - c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - d. Kemudahan berusaha
 - e. Dukungan riset dan inovasi
 - f. Pengadaan tanah
 - g. Kawasan ekonomi
 - h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
 - i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
 - j. Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Undang Undang ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka UU

Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

1. Perijinan berbasis RDTR
2. Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
3. Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebaran informasi APZ Nasional;
6. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa proses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub
10. Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	98.94%	317,648,272,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	98.94	205,136,380,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	2400 RT	317,648,272,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	2400	205,136,380,000
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran SPAM	2	400.000.000
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	5 dokumen	17,167,500,000	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1	100.000.000
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	60 unit	274,030,772,000	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	20	186,658,450,000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	3 Unit	26,000,000,000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	30,000	17,877,930,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	150 Orang	450,000,000.00	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	28	100,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	16.63 %	53,825,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	16.63	1,650,000,000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4 Sistem	53,825,000,000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4	1,650,000,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	4 Dokumen	3,725,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	2	500,000,000
	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	2 Unit	49,000,000,000	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	1	50.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	11 Kab/Kota	1,000,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	4	950,000,000
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	100 Orang	100,000,000	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50	150,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	89 %	2,275,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	89	2,000,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500 jiwa	2,275,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500	2,000,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1,125,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1	1,250,000,000
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	1 Unit	1,000,000,000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	30	650,000,000
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	200 orang	150,000,000	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	35	100,000,000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8.33 %	2.950.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8.33	750,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1,000 meter	2.950.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1,000	750,000,000
	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	150 Orang	450,000,000	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	70	100,000,000
	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	4 paket	2,500,000,000	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	1	650,000,000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973	8,784,747,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973	6.036.770.025
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	100	8,784,747,000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	100	6.036.770.025

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dikelola	4 rusunawa	8,784,747,000	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	5	6.036.770.025
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	100 %	246,860,775,370	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	100	464,426,729,700
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah provinsi	20 gedung	246,860,775,370	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah provinsi	7	321,036,770,025
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun	10 gedung	154,084,500,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18	399,513,610,000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	10 gedung	12,211,500,000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	3	1,500,000,000
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	150 Laporan	42,043,000,000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	150	31,905,000,000
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah gedung cagar budaya yang ditetapkan dan direhabilitasi	3 gedung	1,100,000,000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	250,000,000
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		
	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	60 dokumen	37,421,775,370	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	45	31,258,119,700

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	28.57 %	1.575.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	28.57	845,000,000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2 kawasan	1.575.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2	845,000,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/ kota	2 dokumen	1,500,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	770,000,000
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	2 dokumen	50,000,000	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2	50,000,000
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 dokumen	25,000,000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2	25,000,000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 %	3,902,724,630	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100	1,491,880,300
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	82.5	613,760,000		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	82.5	517.123.400
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	1,520 Orang	3,541,090,760	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	1,000	1,156,801,600
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1120 Orang	2,404,812,560	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	150	713,902,200

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	400 Orang	1,136,278,200	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	270	442,899,400
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	2,085	361,633,870	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	85	335,078,700
		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80	613,760,000		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80	517.123.400
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	2000 buletin	166,189,600	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	20	100,041,000
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	85 orang	195,444,270	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	85	235,037,700
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah pengujian yang diinformasikan	100 dokumen	613,760,000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	100	517.123.400
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	79	8.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	79	5,630,000,000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	70	2,200,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	70	2,820,000,000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	100 %	1.400.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1	2,170,000,000
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0 dokumen	0	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1	350,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	200 orang	800,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	300,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	12 kegiatan	1,450,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	10	1,200,000,000
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	12 dokumen	1,450,000,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10	1,200,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2 kegiatan	2,200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2	1,010,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	1 dokumen	1,500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	800,000,000
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	10 Konten	700,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	210,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	37 kegiatan	4,500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	3	600,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	0
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)	1	500,000,000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	0

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan perizinan	35 lokasi	3,500,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2	600,000,000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	5 %	600,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	5	300,000,000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 dokumen	600,000,000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6	100,000,000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	2 dokumen	200,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1	100,000,000
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 dokumen	200,000,000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	100,000,000
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat	2 dokumen	200,000,000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	100,000,000
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	11.56 %	47,340,000,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	11.56	41,822,322,703
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	20.90 %	106,270,000	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	20.90	558,332,671
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 laporan	106,270,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	558,332,671

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9 Ha	47,233,730,000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9	41,263,990,032
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	6 dokumen	370,000,000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4	270,000,000
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	12 dokumen	40,600,000,000	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	12	35,600,000,000
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	1265 meter	6.292.333.590	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	1	5,393,990,032
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	22 %	723,725,902,040	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	22	483,510,677,297
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	24 kawasan	723,725,902,040	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	24	483,510,677,297
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	8 dokumen	841.250.000	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3	207,000,000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Umum dan Komersial	4 dokumen			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	2,764 meter	719.033.572.040	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	13	482,957,882,897
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun	1,402 meter			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	1 Laporan	3.851.080.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	4	345,794,400
		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Umum dan Komersial	1 Laporan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		
11	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100	200,000,000	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100	300,000,000
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20	200,000,000	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20	300,000,000
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	20	200,000,000	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20	300,000,000
12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	800,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	50,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	20	800,000,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	5	50,000,000	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	400,000,000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	20	400,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	50,000,000	
13	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	77	900,000,000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	77	1,020,000,000	
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	2	900,000,000	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	2	1,020,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	2	900,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	2	1,020,000,000	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	82	64,976,115,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	82	59,506,955,397	
		Presentase realisasi anggaran	90				Presentase realisasi anggaran		90
		Persentase indikator program yang tercapai	90.43				Persentase indikator program yang tercapai		90.43
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4	2,500,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4	2,000,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (2022-2024)	7			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (2022-2024)	7	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	24,930,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	24,930,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2	14,092,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	14,092,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	14,092,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	14,092,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	8,942,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8,942,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	2	8,942,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8,942,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	5	2,406,062,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1,906,062,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4	22,940,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	22,940,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12	50,974,487,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12	46.238.841.500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	48,504,387,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	44.729.572.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	955,468,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	663.798.500

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	11,492,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	95.412.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12	405,140,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	233.210.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12	371,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	153.891.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan SKPD	2	254,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	184.129.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah Domumen tanggapan atas LHP	1	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	2.060.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan	12	362,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	174.709.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	1	5,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	2.060.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	34,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	34,500,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	12	8,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	8,500,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	1	2,500,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	2,500,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	4	17,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	17,500,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	2	6,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	6,000,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12	141,392,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12	86.142.500
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	141,392,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	86.142.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3	780,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3	430.500.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12	400,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	300,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	1	250,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	8,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	8,000,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah Laporan Data Pegawai	12	7,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	7,500,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah Laporan SKP	12	65,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	65,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	50,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	22	1,736,068,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	22	2.269.958.670
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1	27,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	27,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1	160,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	160,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1	12,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	93.356.522
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	1	85,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	85,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1	95,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	95,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1	43,032,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.507.434
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	1	65,632,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	62.951.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	1	51,362,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	58.494.258
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	50,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	1	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	3.605.700
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Pengadaan	1	89,929,700	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	148.529.556

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	40	75,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	75,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1	775,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	575.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1	188,612,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	770.014.200
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah Daftar Arsip Aktif	3	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	15,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11	2,730,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11	130.070.265
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan	2	630,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	60,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	60,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2,040,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	70.070.265
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	5,099,368,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	7.333.212.462
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Pengiriman Dokumen	1	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3,500,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Pengiriman Dokumen	1	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	6,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	750,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	750,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	8	3,693,368,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	5,007,325,822
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	1	647,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.566.386.640
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara Daerah	12	979,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12	983.730.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	1	450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30	450,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	1	31,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan perizinannya	1	33,600,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	150,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	18,760,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	27.810.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	270,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	270,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	27,440,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	22.320.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	1	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30,000,000
TOTAL JUMLAH				1.487.327.296.040				1.274.993.838.822

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari kabupaten/kota. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

4. Perlu adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak, mengingat masih tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur yang masih mengkonsumsi air minum yang tidak layak serta banyaknya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur keciptaan karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum dimasing-masing Kabupaten/Kota maupun lintas wilayah(regional). Peluang pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur sebagaimana telah disusun di dalam dokumen RISPAM antara lain:

No	Nama SPAM Regional	Pelanggan/Layanan (2023)	Sumber	Kebutuhan Air (l/detik)
1	Umbulan	1,304,000	Mata air Umbulan	
2	Mojolagres	144,000	Sungai Brantas	
3	Bangkalan – Sampang Utara		Mata air klabetan	300
			Sungai Budur	
			Waduk Nipah	
4	Bangkalan – Sampang Selatan		Waduk Klampis	400

No	Nama SPAM Regional	Pelanggan/Layanan (2023)	Sumber	Kebutuhan Air (l/detik)
			Waduk Blega	
5	Pamekasan – Sumenep Utara	95,401	Sungai pasongsongan	300
6	Pamekasan - Sumenep Sel		Sungai Sumajid dan Sungai Pragaan	400
7	SPAM Pantura (Tuban – Bojonegoro-Lamongan)	443,503	Bengawan Solo	1750
8	SPAM Lintas Tengah (Nganjuk – Kediri – Jombang)	268,053	Kali Brantas	1500
9	SPAM Lintas Selatan (Trenggalek – Tulungagung)	120,000	Bendungan Wonorejo	
10	SPAM Malang Raya (Malang – Kota Malang – Kota Batu)	850,769	Sumber Pitu	1600
11	SPAM Lintas Timur (Situbondo – Bondowoso – Jember – Banyuwangi)	160,000	Sumber Candik	170
12	SPAM Madiun Nganjuk	56,680	Waduk Bening	
13	SPAM Blitar-Blitar	75,000	Mata air Rambut monte	
14	SPAM Lumajang - Jember	240,222	Sumber Mrutu	1750
15	SPAM Lumajang - Probolinggo -Kota Probolinggo	357,394	Sumber Ronggojalu	300
16	SPAM Jember - Bondowoso			
17	SPAM Malang - Malang		Sumber Pitu	1600
18	SPAM Ponorogo - Madiun		Waduk Ngebel	100
19	SPAM Sidokerto (Kalimati)		Dangsongo (Kalimati)	1500

(Sumber:RISPAM Provinsi Jawa Timur)

- Pengentasan daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.

Tabel 4. Data Kekeringan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

KABUPATEN	KECAMATAN	DATA BPBD DESA KEKERINGAN 2018 (422 Desa)	DESA DITANGAN I PUCK 2018 (223 Desa)	DESA DITANGAN I BPBD 2018 (199 Desa)	DATA BPBD DESA KEKERINGAN 2019 BPBD BARU (144 Desa)	DESA DITANGANI 2019 (46 Desa)	RENCANA DESA DITANGANI 2020 (98 Desa)	REALISASI DESA DITANGANI 2020 (88 Desa)	DESA BELUM TERTANGANI	USULAN DESK 2019
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA
BANGKALAN	14	23	12	11	0	0	0	1	26	24
BANYUWANGI	14	23	18	5	5	2	3	3	5	9
BLITAR	11	15	15	0	7	3	4	4	9	15
BOJONEGORO	19	22	13	9	7	1	6	2	38	36
BONDOWOSO	9	9	8	1	2	0	2	0	7	9
GRESIK	9	13	6	7	5	0	5	3	35	32
JEMBER	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0
JOMBANG	7	4	1	3	2	0	2	0	10	10
KEDIRI	5	1	1	0	2	1	1	0	5	9
LAMONGAN	13	10	3	7	6	2	5	2	39	41
LUMAJANG	7	9	4	5	6	3	4	4	9	13
MAGETAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MALANG	12	5	5	0	6	1	5	6	11	17
MOJOKERTO	4	5	3	2	1	0	1	1	2	3
NGANJUK	8	11	9	2	3	0	3	6	11	7
NGAWI	10	11	2	9	0	0	0	1	36	36
PACITAN	12	13	5	8	0	0	0	1	50	52
PAMEKASAN	10	22	12	9	8	2	6	7	21	24
PASURUAN	12	10	4	5	7	3	6	8	15	20
PONOROGO	12	20	11	12	28	16	15	4	1	15
PROBOLINGGO	13	23	13	10	5	2	3	1	8	11
SAMPANG	14	47	12	32	9	4	3	4	41	33
SITUBONDO	12	16	12	4	4	3	2	1	2	5
SUMENEP	16	41	17	24	8	0	7	7	7	13
TRENGGALEK	13	37	17	21	13	1	11	17	6	14
TUBAN	13	21	10	12	6	0	3	2	45	42
TULUNGAGUNG	8	10	9	1	3	1	1	1	2	3
MADIUN	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
TOTAL	280	422	223	199	144	46	98	88	442	495

(Sumber:BPBD Provinsi Jawa Timur)

- Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan Sanitasi yang layak, mengingat masih banyaknya penduduk di Jawa Timur yang ber sanitasi yang tidak layak maka diperlukan kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan sanitasi dan persampahan. Hal ini menjadi peluang pembangunan agar target pelayanan infrastruktur kecipa karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan dan pembangunan yang masif dan masal yang langsung menyentuh masyarakat seperti MCK Komunal, pembangunan saluran drainase rumah tangga, drainase lingkungan, IPLT serta TPS3R dengan skala kawasan.
- Pengentasan kawasan kumuh melalui keterpaduan program dan kegiatan. Pengetasan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan oleh satu program atau satu pihak saja. Pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan melalui keterpaduan program dan kegiatan dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat di kawasan

tersebut. Sehingga dalam satu kawasan kumuh ada intervensi pembangunan Air bersih, pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sanitasi, RTLH serta persampahan. Tujuh indikator kumuh yang menjadi tolak ukur yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau harus disentuh dan di tangani sehingga dengan keterpaduan pembangunan tersebut, kawasan kumuh akan berkurang, tuntas dan tidak akan kembali menjadi kawasan kumuh.

8. Perlunya peningkatan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah dan Swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dapat menjadi potensi yang dapat dikerjasamakan dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha.

Tabel 5. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang di Akomodir

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Banyuwangi	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/Regional	3 Paket	Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pantai Cemara, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Usulan Berupa IPAL Komunal untuk 50 KK, pernyataan ketersediaan lahan (surat pernyataan), disesuaikan dengan kemampuan anggaran
2	Banyuwangi	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Kawasan Permukiman Kumuh Kalibaru Wetan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan air tahun 2022 akan disusulkan, lokasi diakomodir apabila masuk dalam SK rawan air, usulan berupa SPAM jaringan Perpipaan, terdapat potensi sumber air
3	Banyuwangi	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan	1 Paket	Kawasan Permukiman Kumuh Kalibaru Wetan, Desa Kajarharjo,	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan air tahun 2022 akan disusulkan, lokasi diakomodir apabila masuk dalam SK rawan air, usulan berupa SPAM jaringan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		air gubernur/ bupati/ walikota)		Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi			Kabupaten/ Kota		Perpipaan, terdapat potensi sumber air
4	Banyuwangi	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Kawasan Permukiman Kumuh Kalibaru Kulon, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan air tahun 2022 akan disusulkan, lokasi diakomodir apabila masuk dalam SK rawan air, usulan berupa SPAM jaringan Perpipaan, terdapat potensi sumber air
5	Banyuwangi	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/ bupati/ walikota)	2 Paket	Kawasan Permukiman Kumuh Giri Barat, Desa Grogol dan Desa Jambesari, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan air tahun 2022 akan disusulkan, lokasi diakomodir apabila masuk dalam SK rawan air, Lokasi yang diusulkan : Desa Grogol Kecamatan Giri, usulan berupa SPAM jaringan Perpipaan, terdapat potensi sumber air
6	Bondowoso	Penyediaan PSU Permukiman	5 Paket	Perumahan Istana Bondowoso, Perumahan Kelapa Gading Regency,	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk	Kegiatan Berupa Jalan Lingkungan (Paving), diakomodir sesuai kemampuan anggaran, Perumahan Istana Bondowoso (P1),

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Perumahan Bataan Permai, Perumahan Kembang Asri, Perumahan River Side Garden, Kab. Bondowoso				menunjang Fungsi Permukiman	Perumahan Bataan Permai (P2), Perumahan Kelapa Gading Regency (P3), Perumahan Kembang Asri (P4), Perumahan River Side Garden (P5)
7	Jombang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha) – peningkatan kualitas jalan paving 8 RT, pembangunan drainase dan normalisasi drainase	1 Paket	Desa Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Menjadi prioritas 1 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Jombang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha) – peningkatan kualitas jalan lingkungan dan peningkatan kualitas drainase	1 Paket	Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kab. Jombang	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Menjadi prioritas 2 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Mojokerto	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha) –	2 Paket	Kelurahan Sarirejo dan Kelurahan Sawahan	2 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan	Kelurahan Sarirejo menjadi prioritas 1 dan Kelurahan Sawahan menjadi prioritas 2 disesuaikan dengan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		peningkatan kualitas jalan lingkungan dan peningkatan kualitas drainase						Luas 10-15 Ha	kemampuan anggaran
	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air Gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Desa Sepawon, Kec. Plosoklaten	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Menjadi prioritas 1 masuk dalam SK desa rawan air, dan dilengkapi dengan proposal serta SK Bupati terkait rawan air serta diakomodir sesuai dengan kemampuan anggaran
	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air Gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Desa Petungrojo, Kec. Mojo	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Menjadi prioritas 2 masuk dalam SK desa rawan air, dan dilengkapi dengan proposal serta SK Bupati terkait rawan air serta diakomodir sesuai dengan kemampuan anggaran
	Malang	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air Gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Desa Sindurejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kebutuhan Sumur bor di 1 titik, lokasi ini menjadi Prioritas 2, dilengkapi proposal dan dilakukan cek lokasi untuk mengetahui kebutuhan dan potensi, disesuaikan dengan kemampuan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
									anggaran
	Malang	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air Gubernur/ bupati/ walikota)	1 Paket	Desa Wonoayu, Kec. Wajak	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Merupakan Prioritas 1, termasuk di Kawasan khusus, lereng gunung semeru, perlu dilengkapi proposal dan dilakukan cek lokasi untuk mengetahui kebutuhan dan potensi, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Malang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha) – drainase lingkungan	2 Paket	Desa Kedungrejo, Kec. Pakis	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 1, usulan berupa drainase lingkungan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Malang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Bunutwetan, Kec. Pakis	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 2, usulan berupa drainase lingkungan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Malang	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal/Regional	1 Paket	Desa Turirejo, Kec. Lawang	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Usulan berupa IPAL Komunal untuk 60 KK, akan dilaksanakan apabila ketersediaan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
							Regional	Terpusat	lahan sudah siap, lahan merupaka tanah jas desa, calon pemanfaat sudah siap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kawasan Kumuh Desa Penunggul Kec. Nguling	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 1, usulan berupa jalan lingkungan dan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kawasan Kumuh Desa Raci Kec. Bangil	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 2, usulan berupa jalan lingkungan dan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kawasan Kumuh Desa Tambakan, Kec. Bangil	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 3, usulan berupa jalan lingkungan dan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kawasan Kumuh Desa Sidogiri Kec. Kraton	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 4, usulan berupa jalan lingkungan dan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Tawang Rejo RT.07 RW.03 Jl. Tawang Sakti Gg. II	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 1, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Tawang Rejo RT.23 RW 06 Jl. Tawang Jaya	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 2, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Nambangan Kidul RT 41 RW 13 Jl. Kaswari Gg. Modin	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 3, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Nambangan Kidul RT 13 RW 04 Jl. Paus	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 4, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Nambangan Kidul RT 38 RW 12 Jl. Arwana	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan Prioritas 5, disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kab. Lamongan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	1 Paket	Bedingin, Gerbangangkrik, Sewor	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Usulan berupa tangka septic komunal 50 KK, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Lamongan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Rancangkencono, Lamongan	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Peningkatan jalan dan saluran, perlu ditambahkan baseline, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Lamongan	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	Tikung, Blubuk Sugio, Glagah, Karangbinangun, Sarirejo	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Sudah ada SK Rawan Kekeringan Tahun 2020, belum terjangkau SPAM Mojolagres, rencana sumber air dari air permukaan, lokasi kegiatan yang diakomodir Prioritas 1 di Desa Blubuk, Kec. Blubuk; Prioritas 2 di Desa Sarirejo, Kec. Sarirejo. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Lumajang	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang	1 Paket	Desa Sumberwringi, Kab. Lumajang	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Dilengkapi dengan proposal dan SK Bupati terkait rawan air

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)					Lintas Kabupaten/ Kota		
	Kab. Magetan	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Desa Mantren, Kec. Karangrejo	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Usulan kegiatan berupa drainase permukiman, diakomodir pada lingkungan permukiman, disesuaikan kemampuan anggaran
	Kab. Magetan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Manisrejo, Kec. Karangrejo	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Termasuk dalam SK Kumuh Kewenangan Provinsi, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Nganjuk	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 Paket	Perumahan Villa Cabdi Mas, Desa Candirejo, Kec. Loceret	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 1, Aset sudah diserahkan ke Pemkab, usulan berupa perbaikan jalan paving, disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kab. Nganjuk	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 Paket	Perumahan Nuansa Kapas Asri, Kelurahan Kapas, Kec. Sukomoro	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 2, Usulan berupa kegiatan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Nganjuk	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 Paket	Perumahan Griya Nglawak Asri, Desa Nglawak, Kec. Kertosono	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 3, usulan berupa kegiatan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Nganjuk	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Karangasem Tmur dan Barat RW 3 Desa Balongpacul, Kec. Nganjuk	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan usulan prioritas 1, kegiatan drainase dan paving, diakomodir sesuai kemampuan anggaran
	Kab. Nganjuk	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Bendil, Kec. Berbek	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan usulan prioritas 2, kegiatan drainase dan paving, diakomodir sesuai kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kab. Ngawi	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Dusun Kwarut RT01-03 RW 11 Desa Mangunharjo, Kec. Ngawi	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi tidak masuk Kawasan kumuh, masuk kategori PSU Permukiman Swadaya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Ngawi	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Dusun Sukowiyono V, Desa Sukowiyono, Kec. Padas	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 1, Lokasi tidak masuk Kawasan kumuh, masuk kategori PSU Permukiman Swadaya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Ngawi	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 Paket	Perumahan Dian Wirajaya Regency Desa Budug, Kec. Kwadungan	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Syarat yang dipenuhi adalah sudah membangun 50 unit rumah, disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kab. Ngawi	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	RT 005/RW 002 Desa Walikukun, Kec. Widodaren	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Bupati tentang Daerah Rawan Air Tahun 2021 (menyusul), disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pacitan	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	Desa Temon Kec. Arjosari Kab. Pacitan	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan Air Tahun 2022 (menyusul), Potensi sumber air dari mata air, usulan berupa SPAM jaringan perpipaan, reservoir, dan broncaptering dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pacitan	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	Desa Tinatar, Kec. Punung	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SK Rawan Air Tahun 2022, Potensi sumber air pipa distribusi dari mata air, usulan berupa SPAM jaringan perpipaan, reservoir, dan broncaptering dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Pamekasan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan		Desa Nyalabu laok, Nyalabu daya, Kel. Jungcangcang,		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan	Usulan berupa jalan lingkungan dan drainase, usulan diakomodir (P1) Kel.

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		luasan 10-15 Ha)		Kec. Pamekasan			Luas 10-15 Ha	Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Jungcangcang, (P2) Desa Nyalabu Daya, (P3) Desa Nyalabu Laok, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Ponorogo	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)		Mangkujayan, Kec. Ponorogo Setono, Kec. Ponorogo Somoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Masuk dalam SK Kumuh Tahun 2020, kegiatan berupa jalan lingkungan dan drainase, usulan diakomodir (P1) Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo, (P2) Kel. Setono Kec. Jenangan, (P3) Desa Somoroto Kec. Kauman, Kab. Ponorogo
	Kab. Ponorogo	Penyediaan PSU Permukiman		Ds. Karang-Kec. Badegan, Ds. Sawoo-Kec. Sawoo, Ds. Bancangan-Kec. Sambit, Ds. Jarak-Kec. Siman, Ds. Purwosari-Kec. Babadan, Ds. Patihal kidul-Kec. Siman, Kab.		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Bukan Kawasan Kumuh, Masuk PSU Permukiman, (P1) Ds. Karang Kec. Badegan, (P2) Ds. Sawoo Kec. Sawoo, (P3) Ds. Bancangan Kec. Sambit, (P4) Ds. Purwosari Kec. Babadan, (P5) Ds. Purwosari Kec. Babadan, (P6) Ds. Patihal Kidul Kec. Siman, Alokasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Ponorogo					
	Kab. Sampang	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	5 paket	Ds. Batukarang Kec. Camplong, Ds. Sejati Kec. Camplong, Ds. Muktesareh Kec. Kedungdung, Ds. Gunug eleh Kec. Kedungdung, Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Diakomodir di lokasi Desa Gunung Eleh Kec. Kedundung dengan melengkap proposal dan SK Bupati ttg daerah Rawan Air, akan dilaksanakan dengan pengecekan potensi pelaksanaannya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Sampang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	5 Paket	Dsn. Pesisir, Ds. Tamba'an Kec. Camplong, Dsn. Macanan, Ds. Taman Kec. Sreseh, Dsn. Jiken Ds. Taman Kec. Jrengik, Dsn, Junglorong Ds.	3 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	SK Kumuh terakhir tahun 2018 akan diupdate tahun ini disahkan, akan diakomodir di lokasi yang disertai SK Kumuh terbaru, P1 Dsn. Pesisir Desa Tamba'an Kec. Camplong, P2 Dsn. Jiken Desa Taman Kec. Jrengik, P3 Dsn.

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Komis Kec. Kedundung, Dsn. Kolo Ds. Apa'an Kec. Pangarengan Kab. Sampang					Junglorong Ds. Komis Kec. Kedundung, Usulan kegiatan berupa jalan lingkungan dan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Sidoarjo	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	7 Paket	Ds. Sumokembang asri, Ds. Bligo, Ds. Bangah, Ds. Pekauman, Ds. Sidokare, Ds. Kloposepuluh, Ds. Sukodono Kab. Sidoarjo	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugara/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Rencana pelaksanaan permukiman kumuh oleh DPRKPCK di 3 lokasi yaitu Ds. Sumikembangsari, Ds. Bangah, Ds. Sidokare. Lokasi usulan berupa paving dan saluran diakomodir dengan urutan lokasi prioritas sbb: P1 Ds. Sidokare (Lanjutan tahun 2022), P2 Ds. Pekauman, P3 Ds. Kloposepuluh, P4 Ds. Bligo, P5 Ds. Sumokembangaasri (lanjutan tahun 2022) , P6 Ds. Sukodono, P7 Ds. Bangah, Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kab. Sumenep	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Ds. Kertasada, Pinggirpapas, Babalan Patean Kab. Sumenep	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Menyesuaikan kemampuan anggaran, kegiatan jalan lingkungan dan drainase
	Kab. Sumenep	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	3 Paket	Perumahan Randu Permai I, Perumahan Randu Permai II, Bukit Damai B21 tahap 2 Kab. Sumenep	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Akomodir untuk Bukit Damai B21, diakomodir sesuai kemampuan anggaran, kegiatan berupa jalan lingkungan (Paving)
	Kab. Sumenep	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	Dusun Lenteng Desa Basoka, Kab. Sumenep	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Ada potensi sumber air, mohon dilengkapi dengan proposal dan SK Bupati
	Kab. Trenggalek	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	RT 08 Rw 03 Desa Sengon Kec. Bendungan	1 paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU	Merupakan Prioritas 1 Lokasi pada jalan lingkungan permukiman, disesuaikan dengan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						(PSU)		di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	kemampuan anggaran
	Kab. Trenggalek	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	RT 10 dan RT 11 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab Trenggalek	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 2, lokasi pada jalan lingkungan permukiman, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Trenggalek	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	RT 16 RW 07 Desa Wonocoyo Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 3, lokasi pada jalan lingkungan permukiman, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Trenggalek	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	RT 43 RW 12 Desa Jombok Kec. Pale Kab. Trenggalek	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang	Merupakan Prioritas 4, lokasi pada jalan lingkungan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
								Fungsi Permukiman	
	Kab. Trenggalek	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Perum Pondok Taman Asri Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Diakomodir dengan memastikan asset jalan sudah diserahkan kepada Pemda, masuk program PSU Swadaya, bila belum diserahkan, maka masuk program SPU Rumah Umum dan Komersial dengan S&K berlaku, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Tuban	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Desa Pekuwon, Kec. Rengel, Kab. Tuban	1 Paket	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU di Permukiman Untuk menunjang Fungsi Permukiman	Merupakan Prioritas 1, Kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan perumahan swadaya (paving), disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Tuban	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang	1 Paket	Desa Jlodro Kec. Kenduruan Kab. Tuban	1 Paket	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Belum ada SK rawan Air maka lokasi akan dicek Kembali berdasarkan data rawan air dari BPBD Provinsi, masuk

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETERANGAN
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)					Lintas Kabupaten/ Kota		dalam daftar Desa/ Kecamatan yang mendapatkan dropping air (data BPBD Kab. Tuban), Ada potensi air, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Tulungagung	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Beji Kec.Boyolangu, Kab. Tu	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan kegiatan lanjutan tahun 2022 (drainase), tahun 2023 melanjutkan pembangunan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Kab. Tulungagung	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung	1 Paket	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha	Merupakan kegiatan lanjutan tahun 2022 (drainase), Tahun 2023 melanjutkan pembangunan drainase, disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Tabel 6. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang tidak di Akomodir

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			ALASAN TIDAK DIAKOMODIR
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	
1	Kab. Gresik	Penyediaan PSU Permukiman (Saluran drainase lingkungan)	1 Paket	Desa Dalegan, Kec. Panceng, Kab. Gresik	Lokasi tidak termasuk dalam SK kumuh Kewenangan Provinsi
2	Kab. Jember	Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Dampak Relokasi Program Pembangunan Pemerintah Provinsi	1 Paket	Arjasa, Kab. Jember	Sudah dilaksanakan pada tahun 2021
3	Kab. Kediri	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Program KOTAKU Kampung Inggris, Kec. Pare	Masuk SK Kumuh yang menjadi kewenangan Pusat
4	Kab. Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Mlaten, Kec. Nguling	Masuk SK Kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten
5	Kab. Probolinggo	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/Regional	1 Paket	TPA Seboroh, Kec. Krejengan	Usulan berupa IPAL Komunal untuk IKM batik tidak dapat diakomodir karena lokasi bukan di Kawasan permukiman
6	Kota Blitar	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	RW 01,06 dan 07 Kelurahan Kauman Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Terdapat di SK Kumuh tahun 2020 dan lokasinya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
7	Kota Malang	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Perumahan PNS Jl. Tebo Kelurahan Bandulan, Kec. Sukun	Aset merupakan milik Pemda, belum ada rumah yang dibangun, disarankan diajukan proposal ke DPRKPKCK diluar musrenbang
8	Kab. Lamongan	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan	1 Paket	Lamongan, Tikung, Kab. Lamongan	Terdapat di SK Rawan kekeringan Tahun 2020, potensi sumber air permukaan, disarankan untuk masuk rencana pengembangan SPAM

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			ALASAN TIDAK DIAKOMODIR
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	
		dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)			Mojolagres
	Kab. Lamongan	Pengembangan SPAM berbasis Masyarakat (Penanganan Desa Rawan Kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan air Gubernur/bupati/walikota)	1 Paket	Bangkalan Pule, Kab. Lamongan	Terdapat di SK Rawan kekeringan Tahun 2020, potensi sumber air permukaan, disarankan untuk masuk rencana pengembangan SPAM Mojolagres
	Kab. Lumajang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Termasuk dalam SK Kumuh Kewenangan Pusat karena luasan lebih dari 15 Ha
	Kab. Lumajang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Banjarwaru dan Desa Denok Kec. Lumajang	Termasuk dalam SK Kumuh Kewenangan Pusat karena luasan lebih dari 15 Ha
	Kab. Magetan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kelurahan Kraton, Kec. Maospati	Lokasi merupakan Kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Pusat
	Kab. Ngawi	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	5 Paket	RT 003/ RW 003, RT 003/RW 002, RT 005/ RW 002, RT 004/RW 005 Desa Walikukun, Kec. Widodaren	Usulan berupa tangka septic individual 79 SR, bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan pada program jambanisasi Kodam V Brawijaya
	Kab. Ngawi	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	1 Paket	Desa Widodaren, Gendingan, Bulung (Kec. Widodaren), Jogorojo, Geneng, Tempuran	Kegiatan berupa Pengadaan Kendaraan Sedot Limbah IPAL Keliling 2 Unit, disarankan untuk diusulkan pada APBN
	Kab. Sampang	Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena dampak relokasi program pembangunan Pemerintah Provinsi	5 Paket	Dsn. Lebak Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah, Dsn. Baban Ds. Pangilen Kec. Sampang, Dsn. Pandian Desa Batuporo Timur Kec.	Diusulkan pada Kodim untuk Program Rutilahu

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			ALASAN TIDAK DIAKOMODIR
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	
				Kedungdung, Dsn. Karang Oloh Ds. Darma Kec. Camplong, Jl. Mangkubumi Kec. Sampang, Kab. Sampang	
	Kab. Ngawi	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	3 Paket	Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah, Ds. Jrangoan Kec. Omben, Ds. Tambak Kec. Omben Kab. Sampang	Lokasi tidak termasuk dalam Kawasan kumuh kewenangan Provinsi, SK Kumuh terakhir tahun 20218 akan diupdate dan tahun ini disahkan
	Kab. Sidoarjo	Penyediaan PSU Permukiman	1 Paket	Desa Pagerwojo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	Diluar kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten dapat diusulkan melalui BK
	Kab. Sumenep	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Ds. Legung Kab. Sumenep	Desa Legung Kab. Sumenep tidak termasuk dalam Kawasan kumuh dalam SK
	Kab. Tuban	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Beji Kec. Jenu Kab. Tuban	Lokasi tidak termasuk dalam Kawasan kumuh Kewenangan Provinsi, Tapi termasuk kewenangan pusat
	Kab. Tuban	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	1 Paket	Desa Dahor Kec. Grabagan Kab. Tuban	Usulan berupa tangga septik individual 50 KK, bukan kewenangan provinsi, dapat diusulkan pada program Jambanisasi kodam V Brawijaya
	Kab. Tuban	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal/ Regional	1 Paket	Desa Menilo Kec. Soko, Kab. tuban	Usulan berupa tangga septik individual, bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan pada Program jambanisasi Kodam V Brawijaya

Tabel 7. Dukungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam pokok-pokok pikiran Dewan

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Memperluas program padat karya secara masif di sasaran/obyek yang tepat (pinggir hutan, perkebunan, pertanian)dengan pengendalian yang ketat.	Program padat karya dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman (melalui dana hibah kepada kelompok masyarakat)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
2	Bantuan untuk RTLH termasuk yang terkena musibah banjir/longsor.	Dilaksanakan dengan skema kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kodam V Brawijaya	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Pagu tersebut adalah BOP Hibah Rutilahu, untuk nilai hibahnya belum ada keterangan alokasi.

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
3	Perbaikan pasar tradisional, irigasi, embung, jalan desa.	Perbaikan jalan lingkungan/jalan desa dilaksanakan pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
4	Revitalisasi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah. Diantaranya adalah reklamasi wilayah pantai dan pesisir, serta reklamasi kawasan bertebing. Keniscayaan, bahwa revitalisasi RTRW akan berhubungan dengan penegakan hukum.	Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan revisi RTRWP. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 21 Tahun 2021, bahwa RZWP3K harus diintegrasikan dengan RTRW.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
5	Bedah rumah, dengan plafon bantuan lebih dari sebelumnya	Program Rutilahu bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya telah mengalami peningkatan plafond anggaran, yaitu Rp 15juta/rumah, yang di dalamnya termasuk penanganan jamban	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Pagu tersebut adalah BOP Hibah Rutilahu, untuk nilai hibahnya belum ada keterangan alokasi.
6	Hibah Masyarakat, cakupannya, Sanitasi diperluas	Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan IPAL Komunal pada kawasan khusus (kumuh sesuai kewenangan provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
7	Pembangunan Rusunawa, terutama di kawasan sub-urban, antara lain, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.	Pembangunan Rusunawa dilaksanakan melalui dan APBN, sedangkan untuk pengelolaan dan operasional sebagian dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi mendukung penyediaan sarana prasarana lingkungan melalui sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
8	Infrastruktur. Banyak fasilitas umum yang hancur akibat banjir serta bencana lainnya, sehingga perlu dan wajib untuk diperbaiki dalam tahun 2023. Tentu ini membutuhkan biaya yang besar. Tapi harus tetap menjadi bagian prioritas untuk menghubungkan dan menggerakkan roda	Perbaiki fasilitas umum yang terdampak bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tuisi dan kewenangannya.					

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	perekonomian masyarakat Jawa Timur.						
9	Meningkatkan jumlah RTLH (Rumah tdk layak Huni) yg dibangun dg memprioritaskan daerah yg menjadi kantong kemiskinan	Dilaksanakan dengan skema kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kodam V Brawijaya	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Pagu tersebut adalah BOP Hibah Rutilahu, untuk nilai hibahnya belum ada keterangan alokasi.
10	Kajian dan pendampingan limbah masyarakat dan pondok pesantren.	Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan IPAL Komunal pada kawasan khusus (kumuh sesuai kewenangan provinsi). Penanganan limbah pada pondok pesantren dapat dilaksanakan melalui dana hibah kepada lembaga/yayasan berbadan hukum.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		

NO	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	TANGGAPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
11	Program penanganan desa rawan kekeringan;	Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan SPAM pada kawasan khusus (daerah kekeringan dan kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan		
12	Program Penanganan daerah Rawan Banjir dan Bencana alam;	Identifikasi kawasan rawan bencana dan penanganan perumahan permukiman pasca bencana provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Target pembangunan nasional pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP 2023 yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur bidang Keciaptakarya adalah **Prioritas Nasional 5** yang berisikan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dalam hal ini terkoneksi dengan **Prioritas Jatim 2** Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur, dengan arah kebijakan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemic Covid-19, melanjutkan transformasi social ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis didapatkan perlunya menyusun arah kebijakan dan strategi pencapaian target dan sasaran penyediaan air minum dengan penyusunan RISPAM Provinsi

Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah diantaranya dengan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8)

mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkat kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Keterkaitan dan kesesuaian Kebijakan dan sasaran Nasional tahun 2023 dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Kerja 2023 adalah tercapainya peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui program penyediaan sanitasi dan air minum serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi Kawasan kumuh dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu:

Tabel 8. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan nilai Implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas	Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran dan evaluasi capaian kinerja
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak	Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG

MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase regional
		Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan penanganan Kawasan kumuh permukiman kewenangan provinsi
		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana bangunan rumah dan lingkungan yang layak huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana provinsi
			Meningkatkan pengembangan PSU kawasan perumahan baik swadaya maupun komersil
		Peningkatan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatkan pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara sesuai NSPK	Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan negara melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, bantuan teknis, identifikasi, penetapan dan pengelolaan sesuai standar
		optimalisasi penanganan revitalisasi kawasan	Mengoptimalkan penanganan revitalisasi kawasan dengan penyusunan rencana kebijakan, supervisi dan monitoring RTBL Kabupaten/kota sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan
		Peningkatan kualitas tenaga ahli konstruksi, kapasitas sistem SIPJAKI serta pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi	Melaksanakan pelatihan/ pembinaan tenaga ahli dan kelembagaan konstruksi
			Meningkatkan pelayanan media informasi jasa konstruksi
			Mengoptimalkan peningkatan pelatihan kapasitas administrator SIPJAKI
			Mengoptimalkan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi disertai dengan peningkatan SDM

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang serta penetapan RTRW dan RTR sesuai pedoman
		Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengidentifikasian, inventarisasi data pertanahan dan mediasi sengketa tanah

Target tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	86,85%
		Presentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	60%
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana tata ruang	89%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	88,34%

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian visi dan misi Gubernur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, adalah **terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong**. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah misi pertama **mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah** yang bertujuan **meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar wilayah** yang memiliki sasaran **meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air** sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah. Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah Bhakti 4 Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu :

1. Urusan Perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera social dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman serta pemenuhan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Timur.
3. Urusan pertanahan melalui program pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan serta penatagunaan tanah.

Tabel 10. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :</p> <p>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman</p> <p>b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</p> <p>c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana</p> <p>d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</p> <p>e) hanya tersedianya 5 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani - Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau - Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan - Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU - minimal perumahan yang memiliki 50 rumah - Pernyaratan pelaksanaan fasilitasi PSU adalah perumahan yang memiliki minimal 50 rumah - masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset - Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB - (tambahkan penghambat penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana) - Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dengan syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima - rendahnya kesadaran atas hak dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM - Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan - Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah - Permendagri no 67 tahun 2011,Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender - Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani - Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan - Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ penggusuran) dengan berbagai karakter	
2	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi:</p> <p>a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak dan aman)</p> <p>b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional</p> <p>c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak dan aman yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak dan aman)</p> <p>d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota</p> <p>e) Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</p> <p>f) Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air - Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional - Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku - Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang - UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme evaluasi teknis dan proses penetapan RTR - Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR - Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021 - Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data dari BNPB terkait SK daerah rawan air/ kekeringan - Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi. - Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM - Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional - Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua - Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021 - Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan - Pembinaan Teknis dapat dilakukan melalui Pelaksanaan sosialisasi,

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				<p>penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>g) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>h) Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p> <p>i) Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan</p> <p>j) belum optimalnya dalam memberikan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</p> <p>k) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan</p> <p>l) Belum Optimalnya informasi SIPJAKI</p>	<p>pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</p> <p>- Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>- Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>- Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi KKPR sehingga perlu penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali.</p> <p>- Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p> <p>- Menurunnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>- Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas</p> <p>- Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan (masih dalam dokume RTBL)</p> <p>- Banyak kawasan di kab/kota yang belum mempunyai peraturan RTBL sebagai salah satu andan rancang bangn suatu lingkungan/ kawasan untuk pemanfaatan ruang, penataan bangunan lngkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program</p>	<p>diseminasi, pelatihan, FGD, dan workshop</p> <p>- Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.</p> <p>- Dukungan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR no 21/PRT/M/2019 tentang SMKK</p>

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara - Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan - Belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi 	
3	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan pertanahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal - Hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar - Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal - Belum adanya sosialisasi mendetail terkait pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. - Belum adanya pedoman maupun panduan pelaksanaan urusan pertanahan secara menyeluruh untuk Pemerintah Daerah. - Belum adanya sinkronisasi kegiatan pertanahan dalam Rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 14 ayat 4 bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib dan pada Pasal 18 ayat 4 terdapat arahan bahwa urusan pertanahan serumpun dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. - Adanya arahan dari RPJMN 2020-2024 bahwa urusan pertanahan terutama terkait sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah menjadi salah satu program prioritas

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). - Belum semua OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi terkait urusan pertanahan. - Belum selarasnya OPD yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten/Kota, karena ada yang urusannya dilaksanakan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maupun Sekretariat Daerah. Selain itu, juga banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membagi urusan pertanahan antara dinas teknis dengan dan Sekretariat Daerah. - Kurangnya sumber daya yang membidangi urusan pertanahan baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain maupun Kanwil/Kantah BPN. - Masih belum sepenuhnya aktif pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten/Kota	Presiden Jokowi. - Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan dan saling terintegrasi. - Dukungan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan reforma agrarian. - Dukungan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pertanahan yaitu PP 18/2021, PP 19/2021, PP 20/2021, dan PP 43/2021.

2. Pencapaian SDG's

Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG's) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain tujuan 6 : memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Tujuan 11: membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.

3. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sedangkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Pengentasan Kemiskinan

Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum regional yang berfokus pada daerah rawan air/ desa rawan kekeringan berperan dalam mengurangi kemiskinan dan pemenuhan air minum layak. Kebutuhan masyarakat akan sanitasi layak, pengelolaan air limbah domestik dan persampahan didukung pembangunan sarana dan prasarana melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, persampahan regional serta sistem drainase. Penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) maupun kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dalam hal ini didukung oleh Program kawasan permukiman untuk penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh. Pendataan

penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program pemerintah dengan menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

3.3.2 Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Terdapat 16 Program yang mencakup 29 kegiatan dan 110 Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 antara lain

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - o Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - o Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
 - o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - o Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - o Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,
- c. Program Penatagunaan Tanah
 - o Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - o Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- e. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - o Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota,
- g. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- j. Program Pengembangan Permukiman
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi,
- k. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
- l. Program Pengembangan Perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- n. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi,
- o. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
- p. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi,
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada pada daerah di Jawa Timur dengan kewenangan Provinsi berupa wilayah regional (antara Kab/Kota) dan terfokus pada daerah rawan air/kawasan kekeringan serta dalam upaya penanganan pengurangan

kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 10-15 Ha dan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Total Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 745.044.732.247 Urusan Perumahan Rakyat bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 528.579.106.575 sedangkan Urusan Pertanahan bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 1.370.000.000.

3.3.3 Penjelasan Rumusan Program

Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik dari jenis program/kegiatan, pagu indikatif dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur.

3.3.4 Penjelasan tabel rencana program Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar										
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Jawa Timur	98.94	Persen	205,136,380,000	APBD		100	Persen	322,648,272,000
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Jawa Timur	2400	Rumah Tangga	205,136,380,000	APBD		2400	Rumah Tangga	322,648,272,000
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Jawa Timur	2	dokumen	400.000.000	APBD		4	dokumen	14,167,500,000
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan / Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	Jawa Timur	1	dokumen	100.000.000	APBD		1	dokumen	1,000,000,000
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Jawa Timur	20	Liter/Detik	186,658,450,000	APBD		22	Liter/Detik	279,030,772,000
1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	Jawa Timur	30,000	SR	17,877,930,000	APBD		30,000	SR	28,000,000,000
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Jawa Timur	28	Kab/Kota	100,000,000	APBD		28	Kab/Kota	450,000,000.00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Jawa Timur	16.63	Persen	1,650,000,000	APBD		21.5	Persen	51,325,000,000
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	Jawa Timur	4	sistem	1,650,000,000	APBD		4	sistem	51,325,000,000
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jawa Timur	2	dokumen	500,000,000	APBD		2	dokumen	1,925,000,000
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Jawa Timur	1	Unit	50.000.000	APBD		2	Unit	48,300,000,000
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jawa Timur	4	dokumen	950,000,000	APBD		4	dokumen	1,000,000,000
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jawa Timur	50	Kelompok Masyarakat	150,000,000	APBD		50	Kelompok Masyarakat	100,000,000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Jawa Timur	89	Persen	2,000,000,000	APBD		95	Persen	2,275,000,000
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	Jawa Timur	500	jiwa	2,000,000,000	APBD		500	jiwa	2,275,000,000
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Jawa Timur	1	Dokumen	1,250,000,000	APBD		2	Dokumen	1,125,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jawa Timur	30	RT	650,000,000	APBD		60	RT	1,000,000,000
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jawa Timur	35	Kelompok Masyarakat	100,000,000	APBD		50	Kelompok Masyarakat	150,000,000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Jawa Timur	8.33	Persen	750,000,000	APBD		8.33	Persen	2,950,000,000
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	Jawa Timur	1,000	meter	750,000,000	APBD		1,000	meter	2,950,000,000
1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Jawa Timur	70	orang	100,000,000	APBD		300	orang	450,000,000
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1	unit	650,000,000	APBD		4	unit	2,500,000,000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Jawa Timur	973	rumah tangga	6,036,770,025	APBD		973	rumah tangga	10,313,747,000
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Jawa Timur	100	Persen	6,036,770,025	APBD		100	Persen	10,313,747,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Jawa Timur	5	Sistem Jaringan	6,036,770,025	APBD		5	Sistem Jaringan	10,313,747,000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	Jawa Timur	100	Persen	464,426,729,700	APBD		100	Persen	246,810,775,370
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jawa Timur	7	gedung	321,036,770,025	APBD		20	gedung	246,810,775,370
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jawa Timur	18	Dokumen	399,513,610,000	APBD		10	gedung	155,209,500,000
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Jawa Timur	3	Unit	1,500,000,000	APBD		10	gedung	12,111,500,000
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jawa Timur	150	Dokumen	31,905,000,000	APBD		150	laporan	42,068,000,000
							APBD		330	orang	
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jawa Timur	1	Unit	250,000,000	APBD		3	gedung	1,100,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Jawa Timur	45	dokumen	31,258,119,700	APBD		60	dokumen	37,421,775,370
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jawa Timur	28.57	persen	845,000,000	APBD		33.33	persen	1,575,000,000
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Jawa Timur	2	kawasan	845,000,000	APBD		2	kawasan	1,575,000,000
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jawa Timur	1	dokumen	770,000,000	APBD		2	dokumen	1,500,000,000
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jawa Timur	2	dokumen	50,000,000	APBD		2	dokumen	50,000,000
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jawa Timur	2	dokumen	25,000,000	APBD		2	dokumen	25,000,000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Jawa Timur	100	persen	1,491,880,300	APBD		100	persen	4,002,724,630

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5		8		9		
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Jawa Timur	82.5		517,123,400	APBD		83.0	637,912,000	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pembedayaan Pembinaan jasa konstruksi	Jawa Timur	1000	orang	1,156,801,600	APBD		1050	orang	3,591,090,760
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Jawa Timur	150	orang	713,902,200	APBD		650	orang	2,404,812,560
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jawa Timur	270	orang	442,899,400	APBD		400	orang	1,186,278,200
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jawa Timur	85	orang	335,078,700	APBD		2,085	orang	411,633,870
		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Jawa Timur	80	persen	517,123,400	APBD		80	persen	637,912,000
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jawa Timur	20	dokumen	100,041,000	APBD		20	dokumen	216,189,600
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Jawa Timur	85	orang	235,037,700	APBD		85	orang	195,444,270
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jawa Timur	100	dokumen	517,123,400	APBD		100	dokumen	637,912,000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Jawa Timur	79	Persen	5,630,000,000	APBD		80	Persen	9,610,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4		5		8		9	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jawa Timur	70	Persen	2,820,000,000	APBD	80	Persen	900,000,000
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jawa Timur	1	dokumen	2,170,000,000	APBD			
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Jawa Timur	1	dokumen	350,000,000	APBD			
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jawa Timur	1	dokumen	300,000,000	APBD	3	dokumen	900,000,000
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Jawa Timur	10	kegiatan	1,200,000,000	APBD	10	kegiatan	1,500,000,000
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jawa Timur	10	dokumen	1,200,000,000	APBD	10	dokumen	1,500,000,000
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Jawa Timur	2	kegiatan	1,010,000,000	APBD	2	kegiatan	2,310,000,000
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jawa Timur	1	dokumen	800,000,000	APBD	1	dokumen	1,600,000,000
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jawa Timur	1	dokumen	210,000,000	APBD	1	dokumen	710,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Jawa Timur	3	kegiatan	600,000,000	APBD		37	kegiatan	4,900,000,000
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jawa Timur	0	dokumen	0	APBD		1	dokumen	606,500,000
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jawa Timur	0	Kasus	0	APBD		1	Kasus	500,000,000
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jawa Timur	2	dokumen	600,000,000	APBD		35	dokumen	3,793,500,000
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar										
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Jawa Timur	5	persen	300,000,000	APBD		6	persen	700,000,000
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jawa Timur	6	Dokumen	300,000,000	APBD		7	Dokumen	700,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jawa Timur	1	Dokumen	100,000,000	APBD		2	Dokumen	200,000,000
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jawa Timur	1	Dokumen	100,000,000	APBD		3	Dokumen	300,000,000
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jawa Timur	1	Dokumen	100,000,000	APBD		2	Dokumen	200,000,000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Jawa Timur	11.56	persen	41,822,322,703	APBD		12.18	persen	47,980,000,000
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	20.90	persen	558,332,671	APBD		36.57	persen	106,270,000
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jawa Timur	5	laporan	558,332,671	APBD		1	laporan	106,270,000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jawa Timur	9	Ha	41,263,990,032	APBD		10	Ha	47,873,730,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	4	dokumen	270.000.000	APBD	7	dokumen	470,000,000
1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	12	dokumen	35,600,000,000	APBD	1	dokumen	40,600,000,000
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Jawa Timur	1	Ha	5,393,990,032	APBD	10	Ha	6,803,730,000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jawa Timur	22	persen	483,510,677,297	APBD	24	persen	725,485,902,040
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Jawa Timur	24	kawasan	483,510,677,297	APBD	26	kawasan	725,485,902,040
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jawa Timur	3	dokumen	207,000,000	APBD	9	dokumen	560,000,000
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jawa Timur	13	Lokasi	482,957,882,897	APBD	26	meter	713,092,942,040

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Jawa Timur	4	laporan	345,794,400	APBD	1	laporan	3,749,310,000
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jawa Timur	100	persen	300.000.000	APBD	100	persen	200,000,000
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Jawa Timur	20	dokumen	300.000.000	APBD	20	dokumen	200,000,000
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jawa Timur	20	dokumen	300.000.000	APBD	20	dokumen	200,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jawa Timur	100	persen	50,000,000	APBD	100	persen	1,150,000,000
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Jawa Timur	5	kasus	50,000,000	APBD	20	kasus	1,150,000,000
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	0	dokumen	0	APBD	1	dokumen	750,000,000
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	2	Berita Acara	50,000,000	APBD	20	Berita Acara	400,000,000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Jawa Timur	77	persen	1,020,000,000	APBD	100	persen	1,340,000,000
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Jawa Timur	2	dokumen	1,020,000,000	APBD	3	dokumen	1,340,000,000
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jawa Timur	2	Laporan	1,020,000,000	APBD	3	Laporan	1,340,000,000
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Jawa Timur	82		59,506,955,397	APBD		85	64,267,559,000	
		Presentase realisasi anggaran	Jawa Timur	90	persen				90		persen
		Persentase indikator program yang tercapai	Jawa Timur	90.43	persen				90.62		persen
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Jawa Timur	4	dokumen	2,000,000,000	APBD		4	dokumen	2,500,000,000
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	7	dokumen				8	dokumen	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	7	dokumen	24,930,000	APBD		11	dokumen	24,930,000
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	1	dokumen	14,092,000	APBD		1	dokumen	14,092,000
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	1	dokumen	14,092,000	APBD		1	dokumen	14,092,000
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jawa Timur	1	dokumen	8,942,000	APBD		1	dokumen	8,942,000
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	1	dokumen	8,942,000	APBD		1	dokumen	8,942,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	5	laporan	1,906,062,000	APBD	5	laporan	2,406,062,000
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	4	laporan	22,940,000	APBD	4	laporan	22,940,000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	12	dokumen	46,238,841,500	APBD	12	dokumen	51,702,052,000
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	185	Orang/ Bulan	44.729.572.000	APBD	185	Orang	49,231,952,000
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12	dokumen	663.798.500	APBD	12	dokumen	955,468,000
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12	dokumen	95.412.000	APBD	12	dokumen	111,492,000
X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	12	dokumen	233.210.000	APBD	12	dokumen	405,140,000
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	12	dokumen	153.891.000	APBD	12	dokumen	371,500,000
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	2	Laporan	184.129.000	APBD	2	Laporan	254,000,000
X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	1	Dokumen	2.060.000	APBD	1	Dokumen	5,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	12	laporan	174.709.000	APBD	12	laporan	362,500,000
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	1	dokumen	2.060.000	APBD	1	laporan	5,000,000
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Timur	12	laporan	34,500,000	APBD	12	laporan	40,000,000
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1	dokumen	8,500,000	APBD	1	dokumen	10,000,000
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1	laporan	2,500,000	APBD	1	laporan	3,000,000
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	4	laporan	17,500,000	APBD	4	laporan	20,000,000
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	1	laporan	6,000,000	APBD	1	laporan	7,000,000
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jawa Timur	12	Dokumen	86.142.500	APBD	12	Dokumen	141,392,000
X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jawa Timur	12	laporan	86.142.500	APBD	12	laporan	141,392,000
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	3	Dokumen	430,500,000	APBD	3	Dokumen	589,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
X.XX.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	1	unit	300,000,000	APBD		12	paket	450,000,000
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jawa Timur	0	paket	0	APBD		0	paket	0
X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	1	Dokumen	8,000,000	APBD		1	Dokumen	9,000,000
X.XX.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	1	Dokumen	7,500,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	1	Dokumen	65,000,000	APBD		1	Dokumen	70,000,000
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Timur	20	Orang	50,000,000	APBD		20	Orang	50,000,000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Jawa Timur	22	Dokumen	2.269.958.670	APBD		22	Dokumen	1,869,079,000
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	27,500,000	APBD		1	paket	30,000,000
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	160,000,000	APBD		1	paket	200,000,000
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	93.356.522	APBD		1	paket	15,000,000
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	85,000,000	APBD		1	paket	87,500,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
1	2	3		4		5		8		9
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	95,000,000	APBD	1	paket	100,000,000
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	50.507.434	APBD	1	paket	43,582,000
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	62.951.000	APBD	1	paket	72,764,000
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	58.494.258	APBD	1	paket	50,267,800
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1	Dokumen	50,000,000	APBD	1	Dokumen	52,500,000
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1	Dokumen	3.605.700	APBD	1	Dokumen	3,000,000
X.XX.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jawa Timur	1	paket	148.529.556	APBD	1	paket	89,953,200
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	1	laporan	75,000,000	APBD	40	laporan	85,000,000
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1	laporan	575.000.000	APBD	1	laporan	825,000,000
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1	laporan	770.014.200	APBD	1	laporan	197,012,000
X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	3	Dokumen	15,000,000	APBD	3	Dokumen	17,500,000
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	11	laporan	130.070.265	APBD	11	laporan	1,193,000,000
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jawa Timur	0	unit	0	APBD	2	unit	630,000,000
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	2	unit	60,000,000	APBD	1	unit	70,000,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1	unit	70.070.265	APBD		1	unit	493,000,000
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	12	laporan	7.333.212.462	APBD		12	laporan	5,178,236,000
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1	laporan	3,500,000	APBD		1	laporan	4,000,000
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1	laporan	6,000,000	APBD		1	laporan	5,000,000
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	3	laporan	750,000,000	APBD		12	laporan	790,000,000
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	laporan	5,007,325,822	APBD		8	laporan	3,731,736,000
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1	laporan	1.566.386.640	APBD		1	laporan	647,500,000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	12	laporan	983,730,000	APBD		12	laporan	1,054,800,000
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	30	unit	450,000,000	APBD		30	unit	490,000,000
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan perizinannya	Jawa Timur	1	unit	33,600,000	APBD		1	unit	33,600,000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4		5		8		9	
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jawa Timur	20	unit	150,000,000	APBD		20	unit	175,000,000
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jawa Timur	1	unit	27.810.000	APBD		1	unit	18,760,000
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1	unit	270,000,000	APBD		1	unit	275,000,000
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1	unit	22.320.000	APBD		1	unit	27,440,000
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1	unit	30,000,000	APBD		1	unit	35,000,000
TOTAL JUMLAH						1.274.993.838.822					1,494,371,892,040

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: "**MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BAIK ANTAR KELOMPOK, ANTAR SEKTOR, DAN KETERHUBUNGAN WILAYAH**"

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2023

Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mendukung sinkronisasi Program Prioritas Provinsi yaitu Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur dengan mewujudkan kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2023 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2023

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional 2. Penanganan Desa Rawan Kekeringan	1. Pengembangan SPAM Umbulan 2. Penyiapan SPAM regional Probolinggo Lumajang (Probolajang) 3. Penyiapan SPAM Lintas Tengah 4. Pembangunan SPAM di desa rawan kekeringan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	PAD	500.000.000
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	PAD	100.000.000
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	PAD	13.408.450.000
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	PAD	17.877.930.000
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Fasilitasi kerjasama TPA Regional (TPA Kediri)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	PAD	350.000.000
						Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan provinsi	PAD	500.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	PAD	558,332,671
	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	270,000,000
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	5,393,990,032
		Rumah Tingga Layak Huni (RUTILAHU)	Laporan Kerjasama Pelaksanaan Rutilahu			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	35.600.000.000

4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Pembangunan Gedung MUI Jawa Timur (fisik), Pembangunan Plaza Airlangga (Unair), Pembangunan Masjid IISP (Perencanaan), Pembangunan KB Samsat Bangkalan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	399,513,610,000	
2	Rehabilitasi Ruang Rapat Lantai IV Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	1,500,000,000	
3	Inventarisasi dan Identifikasi Kondisi Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Wilayah I (Madiun)/ Wilayah II (Bojonegoro)/ Wilayah III (Malang)/ Wilayah IV (Pamekasan)/ Wilayah V (Jember)	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	APBD	250,000,000	
4	Laporan Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur, Sosialisasi Bangunan Gedung 1 dan 2, usulan rekomendasi biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	APBD	1,905,000,000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Monev Jasa Konstruksi dan Rekonsiliasi Rumah negara golongan III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	APBD	508,119,700	
6	RTBL Kawasan Kab. Jombang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	APBD	770,000,000	
7	Supervisi penentuan lokasi RTBL tahun anggaran berikutnya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	APBD	50,000,000	
8	Monitoring progress pelaksanaan RTBL Kab. Banyuwangi dan Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	APBD	25,000,000	
9	Sertifikasi Keahlian Bidang Jasa Konstruksi dan Bimbingan Teknis SMK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	APBD	713,902,200	
10	Sosialisasi Jasa Konstruksi, Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa, FGD Masyarakat Jasa Konstruksi, Seminar/Workshop TKDN dan Perkembangan Teknologi Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	APBD	442,899,400	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	APBD	100,041,000	
12	Bimbingan Teknis SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI			Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	APBD	235,037,700
13	Sosialisasi/workshop pembinaan Pengelolaan SPAM di Kab/Kota rawan kekeringan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		APBD	100.000.000	
14	Dokumen Rencana Kerjasama TPA Blitar, GKS, Probolinggo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	APBD	600.000.000	
14	Sosialisasi/workshop pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan di Kab/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	APBD	150,000,000	
16	Kajian Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik di bakorwil III, Kajian Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik di bakorwil IV	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	APBD	1.250.000.000	
17	Pembangunan SPALD Komunal (lokasi berdasarkan usulan musrenbang), direncanakan 2 SPALD Komunal	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	APBD	650,000,000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Sosialisasi/workshop pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik di Kab/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	APBD	150,000,000	
19	Sosialisasi/Workshop pembinaan dan pengelolaan drainase di Kab/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	APBD	100,000,000	
20	Pembangunan Drainase Regional dan/atau Drainase di kawasan kumuh wewenang Provinsi (sesuai dengan hasil usulan musrenbang)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan			Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	APBD	650,000,000	
21	Proses Penerbitan Persub dan Penetapan Perda RTRW Provinsi (Pembahasan ranperda dg DPRD Provinsi Jawa Timur)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Program Penyelenggaran Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	APBD	2,170,000,000	
22	Penetapan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Mata Air Umbulan (lanjutan) dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	350,000,000	
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penyusunan dan penetapan RTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	APBD	300,000,000	
24	Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Kab/Kota (sebanyak 10 Rencana Tata Ruang)	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaran Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	APBD	1,200,000,000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (jangka pendek tahunan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	APBD	800,000,000	
26	Operasionalisasi website sistem informasi penataan ruang dan pemenuhan data Indikator kinerja penataan ruang (Dokumen Informasi Penataan Ruang yang diupload melalui website) – Pelatihan Penggunaan SITR untuk Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			Sistem Informasi Penataan Ruang	APBD	210,000,000	
27	Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur dan penilaian pelaksanaan KKPR – Pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang, penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kajian pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	600,000,000
28	Melakukan verifikasi DPPT (dokumen perencanaan pengadaan tanah) Permohonan Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	APBD	300,000,000	
29	Melakukan mediasi sengketa pertanahan guna menyelesaikan sengketa pertanahan dalam satu daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD	50,000,000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Inventarisasi Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota dan pendukung pelaksanaan reforma agraria - Penyusunan Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (lanjutan Trase Pansela ((Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar) dan Penyusunan Inventarisasi Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Rencana Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo - Ketapang)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	APBD	1,020,000,000	
31	Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	APBD	517.123.400	
32	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Gunungsari, Jemundo, Sumurwelut, SIER, Gunung Anyar)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	APBD	6.036.770.025	
33	Pendataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Rawan Bencana di : Kab.Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	APBD	100,000,000	
34	Pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan di Kab. Bondowoso dan Ponorogo	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	APBD	100,000,000	
35	Pendataan Pembangunan Rumah Sewa Milik Masyarakat dan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kab. Malang dan Kab. Sidoarjo	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	APBD	100,000,000	
36	Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Penyediaan PSU Permukiman (Swadaya dan Komersil) - (Lokasi Prioritas : Magetan, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Jember, Bondowoso, Malang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Swadaya)	APBD	207,000,000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Komersial)			APBD

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Pelaksanaan Pembangunan Fisik Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman swadaya dan komersial - (Lokasi Prioritas : Magetan, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Jember, Bondowoso, Malang)	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (swadaya)	APBD	5.824.882.897	
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (komersial)	APBD		
38	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya dan Komersial dengan Kab/Kota di Prov. Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Swadaya)	APBD	345,794,400	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Komersial)	APBD		

BAB 5

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.